

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada pasal 63 disebutkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kehutanan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 104 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka tugas Pokok Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kehutanan;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kehutanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas pada Sekretariat Dinas, Bidang Pemanfaatan Hutan, Planologi Kehutanan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kehutanan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Visi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan adalah :

“Pemantapan Fungsi dan Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Untuk mewujudkan visi diatas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
2. Meningkatkan fungsi dan daya dukung hutan dan lahan untuk optimalisasi fungsi ekologi, serta pemulihan cadangan sumber daya alam.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan.
4. Meningkatkan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan.

1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2016. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2016 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Penjelasan Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1 Pendapatan LO
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Bab VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun 2016, tujuan pembangunan di bidang kehutanan yang ingin dicapai dalam tahun 2016 adalah membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, membangun ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, mempercepat penurunan angka kemiskinan serta memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun 2016 yang juga merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari tahun sebelumnya adalah terwujudnya kepastian hukum dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, berkurangnya tekanan kerusakan hutan melalui konservasi dan perlindungan sumber daya hutan guna menunjang adaptasi perubahan iklim, perbaikan daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemanfaatan hasil hutan pada kabupaten/kota di Sumatera Barat dan perencanaan dan pengembangan kehutanan yang dinamis, terarah dan terpadu di provinsi Sumatera Barat.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2016 meliputi hal berikut :

2.2.1 Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang pendapatan dalam tahun 2016 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dan penyempurnaan sistem pendapatan.
- Peningkatan pendapatan melalui kegiatan yang bersifat intensifikasi.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2016, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 11 program adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target kinerja :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian kinerjanya tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat (perangko, materai dan BBM) selama 1 tahun.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet selama 1 tahun.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, capaian kinerjanya yaitu terpenuhinya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan selama 1 tahun.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun.
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, capaian kinerjanya yaitu tersedianya alat-alat tulis perkantoran 1 tahun.
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan dan penggandaan untuk Dinas dan UPTD selama 1 tahun.
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengadaan barang-barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun.
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian kinerjanya yaitu terpenuhinya pengadaan spanduk, bendera tiang, gorden, bendera panjang, pengadaan racun tabung api sebanyak 10 (sepuluh) unit, pengadaan mesin absensi sebanyak 1 (satu) unit, pengadaan lemari arsip UPTD sebanyak 8 (delapan) unit, pengadaan brandkas UPTD sebanyak 2 (dua) unit, pengadaan kipas angin sebanyak 2 (dua) unit, pengadaan terali besi pengaman, pengadaan generator listrik sebanyak 1 (satu) unit, pengadaan plang nama UPTD sebanyak 2 (dua) buah, pengadaan papan informasi sebanyak 1 (satu) buah, pengadaan galah aluminium tipe lipat sebanyak 2 (dua) unit, pengadaan tangga aluminium sebanyak 1 (satu) buah, pengadaan dispenser sebanyak 2 (dua) unit, pengadaan kulkas sebanyak 1 (satu) unit.

Pengadaan alat laboratorium yang terdiri dari pengadaan alat timbangan analitik sebanyak 1 (satu) unit, alat ukur kadar air sebanyak 1 (satu) unit, tanur uji benih

sebanyak 1 unit, tanur benih suhu tinggi sebanyak 1 (satu) unit, lux meter sebanyak 1 (satu) unit, seed trier test sebanyak 1 (satu) unit, lemari pajang bibit sebanyak 1 (satu) unit, meja kemurnian sebanyak 1 (satu) unit, magnifier with lamp sebanyak 1 (satu) unit, jaring benih sebanyak 2 (unit) unit serta germinator listrik dan non listrik sebanyak 1 (satu) unit.

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, capaian kinerjanya yaitu tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan selama 1 tahun.
- Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, capaian kinerjanya yaitu tersedianya makanan dan minuman rapat selama 1 tahun.
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah, capaian kinerjanya yaitu terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah selama 1 tahun.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Sopir Kantor, capaian kinerjanya terlaksananya penyediaan jasa sopir selama 1 tahun
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya piket senjata api dan pengamanan kantor selama 1 tahun.
- Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengadaan jasa dokumenter dan publikasi selama 1 tahun.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur, capaian kinerjanya yaitu terselenggaranya pembinaan fisik dan mental aparatur selama 1 tahun.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan target kinerja :

- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pembangunan gedung kantor UPTD, bangunan gudang persemaian, koridor, bangunan garase, pos jaga dan pagar.
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengadaan kendaraan roda empat sebanyak 3 (tiga) unit dan pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 3 (tiga) unit selama 1 tahun.
- Kegiatan Pengadaan Meubeleur, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengadaan meubeleur selama 1 tahun yaitu meja kursi tamu sebanyak 1 (satu) set, meja respionis sebanyak 1 (satu) unit, meja rapat KPHL sebanyak 1 (satu) set, kursi rapat aula sebanyak 50 (lima puluh) unit, kursi resepsionis sebanyak 4 (empat) unit dan kursi staf UPTD sebanyak 15 (lima belas) unit.
- Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengadaan laptop sebanyak 4 (empat) unit, komputer

sebanyak 4 (empat) unit, printer sebanyak 6 (enam) unit dan pengadaan scanner AO sebanyak 1 (satu) unit.

- Kegiatan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengadaan alat studio, komunikasi dan informasi selama 1 tahun yaitu pengadaan sound system sebanyak 2 (dua) unit, televisi 60" sebanyak 2 (dua) unit, infocus sebanyak 1 (satu) unit, telepon PABX sebanyak 2 (dua) unit, alat pendeteksi kebakaran hutan (drone) sebanyak 1 (satu) unit serta pengadaan mesin fax sebanyak 2 (dua) unit.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas selama 1 tahun yaitu rumah dinas Jl. Gajah Mada sebanyak 1 (satu) paket dan rumah dinas Jl. Raden Saleh sebanyak 1 (satu) paket.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana mushala, jendela dan atap gedung selama 1 tahun.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional selama 1 tahun.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor (AC, mesin tik, telepon, camera digital, dan sound system) selama 1 tahun.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi, capaian kinerja yaitu terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi selama 1 tahun yaitu pemeliharaan komputer/pc sebanyak 12 (dua belas) unit, pemeliharaan laptop sebanyak 15 (lima belas) unit, pemeliharaan printer sebanyak 12 (dua belas) unit.
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik dan jaringan internet kantor selama 1 tahun.
- Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengelolaan dan pengendalian asset selama 1 tahun.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan target kinerja :

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 154 stel yang terdiri dari 140 pakaian dinas harian PNS dan PTT serta 14 stel pakaian seragam polhut.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan target kinerja:

- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bintek implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 14 orang selama 1 tahun.
- V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan target kinerja :
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, capaian kinerjanya yaitu terlaksana penyusunan laporan keuangan LAKIP, LPPD, LKPJ, dan laporan tahunan (5 dokumen) selama 1 tahun.
 - Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penggaran SKPD, capaian kinerjanya yaitu tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra (6 dokumen) selama 1 tahun.
 - Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran selama 1 tahun.
- VI. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan target kinerja :
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), capaian kinerjanya yaitu laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan bukan kayu (1 laporan) selama 1 tahun.
 - Kegiatan Optimalisasi PNBK, capaian kinerjanya yaitu laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, iuran kehutanan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK hutan alam (3 dokumen) selama 1 tahun.
 - Kegiatan Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman, capaian kinerjanya yaitu laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan olahan realisasi pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman (3 laporan) selama 1 tahun.
 - Kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, capaian kinerjanya yaitu laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan (1 laporan) selama 1 tahun.
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH), capaian kinerjanya yaitu terbina kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan sebanyak 10 (sepuluh) kelompok selama 1 tahun, sehingga meningkatnya aneka usaha hasil hutan bukan kayu di Sumatera Barat.
-
- Kegiatan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan, capaian kinerjanya yaitu tersedianya rencana areal

pengembangan areal hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPHL bukit barisan (2 lokasi / 2 dokumen) selama 1 tahun.

- Kegiatan Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan, capaian kinerjanya yaitu tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/terbinanya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah kelola KPHL bukit barisan (2 dokumen 1 laporan) selama 1 tahun.

VII. Program Rehabilitas Hutan dan Lahan, dengan target kinerja :

- Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan, capaian kinerjanya yaitu tersedianya jumlah bibit yang berkualitas sebanyak 200.000 batang serta terlaksananya pengadaan alat pemeliharaan tanaman yaitu GPS sebanyak 1 unit, alat unduh sebanyak 1 unit, alat produksi/pasca panen benih sebanyak 1 unit selama 1 tahun.
- Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan, capaian kinerja yaitu tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman pada 13 kabupaten/kota selama 1 tahun.
- Kegiatan Konservasi Sumber Daya Genetik, capaian kinerja yaitu terpeliharanya dan teridentifikasinya sumber daya genetik tanaman hutan (4 lokasi) selama 1 tahun.

VIII. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan target kinerja :

- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya musrenbanghutda, rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota (19 kabupaten/kota) selama 1 tahun sehingga dapat meningkatnya sinergisitas perencanaan kehutanan.
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Hkm, HN, HTR dan HR Kemitraan, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan sebanyak 60 orang selama 1 tahun.
- Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR, dan HR Kemitraan, capaian kinerjanya yaitu meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN, HTR dan HR kemitraan) sebanyak 17 kelompok selama 1 tahun.
- Kegiatan Penguatan Forum Komunikasi PHBM Sumatera Barat, capaian kinerjanya yaitu terjalinnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR, dan HR kemitraan) sebanyak 60 orang selama 1 tahun.
- Kegiatan Penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengumpulan data, koordinasi dan monitoring KKMD daerah mangrove di Sumatera Barat sebanyak 1 laporan selama 1 tahun.

- IX. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, dengan target kinerja:
- Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan, capaian kinerjanya yaitu terpeliharanya batas kawasan hutan seluas 70 Km selama 1 tahun.
 - Kegiatan Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu, capaian kinerjanya yaitu tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu (2 lokasi/1 laporan) selama 1 tahun.
 - Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, capaian kinerjanya yaitu terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan peruntukan pada 13 kabupaten/kota selama 1 tahun.
- X. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan target kinerja :
- Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya psikotest, operasi intelijen, operasi refresif/pamhut, monev kasus dan tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan koordinasi (6 Laporan) selama 1 tahun.
 - Kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya fasilitas pengembangan potensi jasa lingkungan (1 Lokasi/Kabupaten 1 Laporan) selama 1 tahun.
 - Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, capaian kinerjanya yaitu teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana/perubahan (4 lokasi/kabupaten 1 Laporan) selama 1 tahun.
 - Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA, capaian kinerja yaitu terlaksananya pelatihan tenaga PPHBN dan penguatan lembaga PPHBN dan sosialisasi perda peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan (sebanyak 80 orang, 475 PPBHN, 1 Laporan) selama 1 tahun.
 - Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengumpulan data PEP RAD-GRK sektor berbasis lahan kehutanan (1 Laporan) selama 1 tahun.
 - Kegiatan Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan, capaian kinerjanya termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar kawasan hutan wilayah kelola KPHL Bukit Barisan (2 Laporan) selama 1 tahun.
- XI. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan target kinerja :
- Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan website kehutanan, pembuatan dokumen statistik kehutanan dan penyebarluasan informasi

kehutanan serta rekonsiliasi penguatan sistem informasi kehutanan (4 laporan) selama 1 tahun.

- Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan, pembinaan DAK bidang kehutanan dan rapat monev (3 laporan) selama 1 tahun.
- Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya implementasi sosialisasi ISO 9001:2008 pelayanan pada dinas kehutanan provinsi Sumatra Barat, audit internal dan audit eksternal (3 laporan) selama 1 tahun.

XII. Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan target kinerja :

- Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan bimbingan teknis kelompok MPA (33 kali dan 1 laporan) selama 1 tahun.

XIII. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan target kinerja :

- Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, capaian kinerjanya yaitu terehabilitasinya lahan kritis di daerah penyangga hutan desa/HKm (65 Ha dan 1 Laporan) selama 1 tahun.
- Kegiatan Pengembangan Sarana Konservasi Tanah, capaian kinerjanya yaitu terbangunnya bangunan konservasi tanah (2 unit 1 laporan) selama 1 tahun.
- Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL, capaian kinerjanya yaitu terlaksananya monitoring dan pembinaan PHL/reklamasi/DAK oleh kab/kota (18 kab/kota dan 1 laporan) selama 1 tahun.
- Kegiatan Pembinaan Monitoring Pengelolaan DAS, capaian kinerjanya yaitu tersedianya buku himpunan peraturan pengelolaan DAS (7 Pergub) selama 1 tahun.
- Kegiatan Rehabilitasi Hutan Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan, capaian kinerjanya yaitu tersedianya dokumen rancangan kegiatan RHL dan terbinanya pelaksanaan rehabilitas DAS oleh pemegang izin (2 dokumen) selama 1 tahun.
- Kegiatan Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK), capaian kinerjanya yaitu terlaksananya penanaman rotan seluas 25 Ha dan pembangunan bank buah seluas 30 Ha selama 1 tahun.
- Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK+ APBD), capaian kinerjanya yaitu terlaksananya pembangunan hutan tanaman jabon pada blok pemanfaatan seluas 60 Ha, terpeliharanya

rehabilitasi hutan dan lahan kritis penanam hutan tanaman jabon pada blok pemanfaatan tahun 1 seluas 35 Ha selama 1 tahun.

- Kegiatan Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK 2016 + APBD), capaian kinerjanya yaitu terlaksananya rehabilitasi hutan kritis seluas 125 Ha, terpeliharanya tanaman rehabilitasi hutan hasil penanaman tahun sebelumnya seluas 35 Ha serta tersusunnya rancangan kegiatan selama 1 tahun.
- Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Operasional KPHL Bukit Barisan (DAK 2016), capaian kinerjanya yaitu tersedianya sarana dan prasarana operasional KPHL bukit barisan selama 1 tahun yaitu berupa kendaraan bermotor beroda dua sebanyak 13 (tiga belas) unit, pengadaan GPS sebanyak 15 (lima belas) unit, pengadaan kompas sebanyak 15 (lima belas) unit, pengadaan alat pemadam kebakaran, pengadaan laptop sebanyak 6 (enam) unit, komputer sebanyak 4 unit dan pengadaan printer sebanyak 4 (empat) unit.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2016, SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah sebesar Rp. 40,261,000.00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah/retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Sedangkan Belanja daerah untuk SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp. 26,541,581,143.00 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp. 10,971,740,718.00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 9,709,121,100.00
- Belanja Modal senilai Rp. 5,860,719,325.00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 48,490,008.00 yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa rumah dinas) sebesar Rp 48,490,008.00

Secara rinci capaian perolehan pendapatan 2016 jika dibanding dengan anggaran tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendapatan Tahun 2016

A	PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH/ KURANG
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40,261,000.00	48,490,008.00	120.44	8,229,008.00
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-		-
2	Pendapatan Retribusi Daerah	40,261,000.00	48,490,008.00	120.44	8,229,008.00
3	Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	-	-	-	-
4	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-

Pada tabel di atas terlihat jumlah realisasi melebihi dari anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp 48.490.008.00 (120.44%) atau lebih besar sebesar Rp 8.229.008,- (20.44%),- dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

3.1.2. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
B	BELANJA-LRA	26,541,581,143.00	24,150,344,226.00	90.99	2,391,236,917.00
I	BELANJA OPERASI	20,680,861,818.00	18,634,962,751.00	90.11	2,045,899,067.00
1	Belanja Pegawai	10,971,740,718.00	10,580,205,290.00	96.43	391,535,428.00
2	Belanja Barang dan Jasa	9,709,121,100.00	8,054,757,461.00	82.96	1,654,363,639.00
II	BELANJA MODAL	5,860,719,325.00	5,515,381,475.00	94.11	345,337,850.00
1	Belanja Tanah	0.00	.00	0.00	0.00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3,422,453,825.00	3,253,095,475.00	95.05	169,358,350.00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	2,438,265,500.00	2,262,286,000.00	92.78	175,979,500.00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	.00	0.00	0.00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	.00	0.00	0.00

Seluruh realisasi belanja setelah konversi pada DPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat setelah perubahan sebesar Rp.24.150.344.226,00 dengan persentase sebesar 90.99% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian realisasi keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 yang terdiri dari 13 program mencapai realisasi kinerja secara keseluruhan sebesar Rp 13.570.138.936,00 (87.16%).

Ikhtisar pencapaian realisasi keuangan menurut program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA dan DPPA SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan total anggaran Rp1.760.740.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 1.793.470.300,- dengan realisasi sebesar Rp 1.488.905.345,- (83.02%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:

✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Hasil : Terpenuhinya barang-barang pendukung jasa surat menyurat pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Pagu dana : Rp 40.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 39.984.000,- (99.96%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Hasil : Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet. Pagu dana : Rp 325.600,000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 199.177.281,- (61.17%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 126.422.719,- merupakan anggaran sisa mati.
- ✓ Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Hasil : Terpenuhinya pembayaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
Pagu dana : Rp 1.100.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 989.323,- (89.94%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Hasil : Terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor. Pagu dana : Rp 210.517,275,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 210.445.000,- (99.97%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor
Hasil : Terpenuhinya penyediaan alat-alat tulis perkantoran selama 1 tahun.
Pagu dana : Rp 82.910.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 82.910.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Hasil : Terpenuhinya penyediaan barang-barang cetakan dan fotocopy selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 39.999.800,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 39.999.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Hasil : Terpenuhinya barang-barang komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 10.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 9.987.000,- (99.87%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Terpenuhinya pengadaan spanduk, bendera tiang, gorden, bendera panjang, pengadaan racun tabung api sebanyak 10 (sepuluh) unit, pengadaan mesin absensi sebanyak 1 (satu) unit, pengadaan lemari arsip UPTD sebanyak 8 (delapan) unit, pengadaan brandkas UPTD sebanyak 2 (dua) unit, pengadaan kipas angin sebanyak 2 (dua) unit, pengadaan terali besi pengaman, pengadaan generator listrik sebanyak 1 (satu) unit, pengadaan plang nama UPTD sebanyak 2 (dua) buah, pengadaan papan informasi sebanyak 1 (satu) buah, pengadaan galah aluminium tipe lipat sebanyak 2 (dua) unit, pengadaan tangga aluminium sebanyak 1 (satu) buah, pengadaan dispenser sebanyak 2 (dua) unit, pengadaan kulkas sebanyak 1 (satu) unit. Pengadaan alat laboratorium yang terdiri dari pengadaan alat timbangan analitik sebanyak 1 (satu) unit, alat ukur kadar air sebanyak 1 (satu) unit, tanur benih suhu tinggi sebanyak 1 (satu) unit, lux meter sebanyak 1 (satu) unit, seed trier test sebanyak 1 (satu) unit, lemari pajang

bibit sebanyak 1 (satu) unit, meja kemurnian sebanyak 1 (satu) unit, maghnifier with lamp sebanyak 1 (satu) unit, jaring benih sebanyak 2 (unit) unit serta germinator listrik dan non listrik sebanyak 1 (satu) unit. Pagu dana : Rp 577.670.500,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 461.676.000,- (79.92%) dan realisasi fisik sebesar 99.55%.

- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Hasil : Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Pagu dana : Rp12.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 10.958.500,- (91.32%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Penyediaan Makanan dan Minuman
Hasil : Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat Pagu dana : Rp 10.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 9.870.000,- (98.70%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah
Hasil : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah. Pagu dana : Rp 200.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp 145.218.216,- (72.61%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 54.781.784,-
- ✓ Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Hasil : Terlaksananya penyediaan jasa sopir. Pagu dana : Rp25.152.725,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 25.152.725,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Hasil : Berjalannya piket senjata api dan pengamanan kantor. Pagu dana : Rp 233.520.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 230.588.800,- (98.74%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Hasil : Terpenuhinya jasa dokumentasi dan publikasi. Pagu dana Rp10.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 7.950.000,- (79.50%) dan realisasi fisik sebesar 90%.
- ✓ Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Hasil : Terjaganya pembinaan fisik dan mental aparatur. Pagu dana : Rp15.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 14.000.000,- (93.33%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan total anggaran Rp 5.272.540.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp5.008.823.225,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.762.355.556- (95.08%).

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:

- ✓ Pembangunan Gedung Kantor
Hasil : Terlaksananya pembangunan gedung kantor UPTD, gudang persemaian, koridor, garase dan pos jaga serta pagar. Pagu dana : Rp2.533.700.000,- dan dana setelah perubahan anggaran

sebesar Rp2.442.365.500,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 2.262.286.000,- (92.63%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

- ✓ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Hasil : Terlaksananya pengadaan roda empat dan roda dua 3 (tiga) unit kendaraan roda empat, 3 (tiga) unit kendaraan roda dua, Pagu dana : Rp 1.407.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp1.231.684.525,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp1.229.534.275,- (99.83%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Pengadaan Meubelier
Hasil : Terpenuhinya penyediaan meubeleur berupa 1 (satu) unit meja kursi tamu, 1 (satu) unit meja resepsionis, 1 (satu) unit meja rapat KPHL, 50 (limapuluh) unit kursi rapat aula, 4 (empat) unit kursi resepsionis, 15 (unit) kursi staf UPTD, Pagu dana : Rp 122.750.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 121.588.500,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 121.588.500,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Hasil : terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi berupa 4 (empat) unit komputer, 4 (empat) unit laptop , 6 (enam) unit printer dan 1 (satu) unit scanner AO. Pagu Dana : Rp275.500.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp246.715.200,-dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp246.715.200,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Pengadan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
Hasil : terlaksananya pengadaan alat studio,komunikasi dan informasi berupa 2 (dua) unit sound system UPTD, 2 (dua) unit televisi , 1 (satu) unit infocus , 2 (dua) unit telepon, 1 (satu) unit alat pendekteksi kebakaran hutan, 2 (dua) unit mesin faximile. Pagu Dana: Rp297.533.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 297.533.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinass/Mess
Hasil : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas sebanyak 6 (enam) unit rumah dinas. Pagu Dana : Rp 191.909.700,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 191.909.700,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
Hasil : Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana mushala, jendela dan atap gedung. Pagu dana : Rp 67.819.900,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 67.819.900,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Hasil : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Pagu dana : Rp 196.510.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 142.699.381,- (72.62%) dan realisasi fisik sebesar 90%. Sisa anggaran

sebesar Rp 53.810.619,- merupakan anggaran sisa mati karena adanya penghematan.

- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yaitu 24 (dua empat) unit AC, 12 (dua belas) unit mesin tik, 10 (sepuluh) unit telepon, 2 (dua) unit camera digital , 1 (satu) unit sound system, 3 (tiga) unit GPS, 1 (satu) unit handycam. Pagu dana : Rp 22.600.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 19.550.000,- (86.50%) dan realisasi fisik sebesar 90%.
 - ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Hasil : Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi yaitu 12 (dua belas) unit pemeliharaan komputer, 15 (lima belas) unit pemeliharaan laptop, 12 (dua belas) unit pemeliharaan printer. Pagu dana : Rp 21.750.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 19.850.000,- (91.26%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Hasil : Terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik dan jaringan internet kantor selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 32.840.900,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 32.781.000,- (99.82%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - ✓ Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
Hasil : Terlaksanaan pengelolaan dan pengendalian aset. Pagu dana : Rp 120.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp135.506.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 130.088.600,- (96.00%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan total anggaran Rp.83.160.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 82.852.000,- (99.63%) serta realisasi fisik 100%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:
- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Hasil : Terpenuhinya penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Pagu dana : Rp.83.160.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 82.852.000,- (99.63%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan total anggaran Rp178.178.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 158.881.150,- (89.17%) serta realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:
- ✓ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
Hasil : Terpenuhinya pelaksanaan keikutsertaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Pagu dana : Rp 178.178.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 158.881.150,- (89.17%) dan realisasi fisik sebesar 92.50%.

- V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan total anggaran Rp 314.113.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 275.539.000,- (87.72%) serta realisasi fisik 100%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:
- ✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Hasil : Terpenuhinya pelaksanaan dokumen laporan keuangan tahun 2016, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan.
Pagu dana : Rp 17.445.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 17.445.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - ✓ Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Hasil : Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, RENJA dan RENSTRA. Pagu dana : Rp 76.864.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 39.394.000,- (51.25%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - ✓ Penatausahaan Keuangan SKPD
Hasil : Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan dan pengeluaran. Pagu dana : Rp 218.420.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 219.804,000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp218.700.000,- (99.05%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- VI. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan total anggaran Rp 1.050.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 878.176.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp711.314.150,- (81.00%) serta realisasi fisik 100%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:
- ✓ Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Hasil : Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan bukan kayu. Pagu dana : Rp 75.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 74.760.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 34.247.150,- (45.81%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - ✓ Optimalisasi PNBK
Hasil : Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, iuran kehutanan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK hutan alam. Pagu dana : Rp 125.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 124.760.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp118.839.250,- (95.25%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - ✓ Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman
Hasil : Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan olahan realisasi pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman sebanyak 3 (tiga) laporan.

Pagu dana : Rp 125.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 124.945.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 78.826.000,- (63.09%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

- ✓ Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
Hasil : Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan. Pagu dana : Rp 125.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 124.300.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 119.074.650,- (95.80%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH)
Hasil : Terbina kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan. Pagu dana : Rp 450.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 286.040.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 237.829.850,- (83.15%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan.
Hasil : Tersedianya rencana areal pengembangan areal hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPHL, Bukit Barisan. Pagu dana : Rp100.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp99.838.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 82.344.750,- (82.48%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Pengelolaan Potensi Hutan Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan
Hasil : Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/terbinanya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan. Pagu dana : Rp 50.000.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 43.533.500,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp40.152.500,- (92.23%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

VII. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan total anggaran Rp513.376.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 414.920.650,- (80.82%) serta realisasi fisik 100%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:

- ✓ Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan.
Hasil : Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas sebanyak 200.000 batang serta terlaksananya pengadaan alat pemeliharaan tanaman yaitu GPS sebanyak 1 unit, alat unduh sebanyak 1 unit, alat produksi/pasca panen benih sebanyak 1 unit selama 1 tahun. Pagu dana : Rp 288.376.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp 264.948.100,- (91.88%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
Hasil : Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman pada 13 kabupaten/kota. Pagu dana: Rp125.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana pada kegiatan ini sebesar Rp96.282.500,- (77.03%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Konservasi Sumber Daya Genetik
Hasil : Terpeliharanya dan teridentifikasinya sumber daya genetik tanaman hutan. Pagu dana : Rp 100.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana

pada kegiatan ini sebesar Rp 53.690.050,- (53.69%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

- VIII. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan total anggaran Rp463.448.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp442.820.450,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp291.946.400,- (65.93%) serta realisasi fisik 100%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:
- ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan.
Hasil : Terlaksananya murenbanghutda, rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat , provinsi dan kab/kota.
Pagu dana : Rp 88.448.000,- dana dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp76.352.450,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp60.745.050,- (79.56%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - ✓ Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan.
Hasil : Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR kemitraan. Pagu dana : Rp 100.000.000,- dana dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 93.548.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp91.236.000,- (97.53%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - ✓ Pembinaan dan Pengembangan HKM, HN, HTR dan HR
Hasil : Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN, HTR dan HR kemitraan). Pagu dana : Rp 175.000.000,- dana dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp173.440.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp78.339.500,- (45.17%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - ✓ Penguatan Forum Komunikasi PHBM Sumatera Barat.
Hasil : Terjalinnnya komunikasi dan shating wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR kemitraan).
Pagu dana : Rp 50.000.000,- dana dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp49.480.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp45.920.600,- (92.81%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - ✓ Penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah.
Hasil : Terlaksananya pengumpulan data, koordinasi dan monitoring KKMD.
Pagu dana : Rp 50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 15.705.250,- (31.41%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- IX. Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, dengan total anggaran sebesar Rp398.726.975,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 372.362.550,- dengan realisasi sebesar Rp 352.357.600,- (94.63%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:
- ✓ Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan
Hasil : Terpeliharanya batas kawasan hutan seluas 70 Km.
Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 184.856.500,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 181.470.400,- (98.17%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
 - ✓ Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu.

Hasil : Tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu.

Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 41.307.050,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 41.032.050,- (99.33%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

✓ Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan.

Hasil : Terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukan pada 13 kabupaten/kota. Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 146.199.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 129.855.150,- (88.82%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

X. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan total anggaran Rp 997.500.000,- dan dana setelah perubahan anggaran sebesar Rp 968.003.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 735.116.285,- (75.94%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:

✓ Pengamanan dan Perlindungan Hutan.

Hasil : Terlaksananya psikotest, operasi intelijen, operasi refresif/ pamhut, monev kasus dan tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan koordinasi. Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp325.000.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp222.141.400,- (68.35%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

✓ Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan.

Hasil : Terlaksananya fasilitas pengembangan potensi jasa lingkungan. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp93.900.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp83.215.535,- (86.62%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

✓ Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan.

Hasil : Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana/perambahan pada 4 lokasi/kabupaten, sehingga terjadi penurunan kasus illegal logging. Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 85.460.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 68.232.200,- (79.84%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

✓ Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA.

Hasil : Terlaksananya pelatihan tenaga PPHBN dan penguatan lembaga PPHBN dan sosialisasi perda peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan hutan. Pagu Dana: Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp267.069.500,- Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 219.510.950,- (82.19%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

✓ Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.

Hasil : Terlaksananya pengumpulan data PEP RAD-GRK sektor berbasis lahan kehutanan. Pagu Dana: Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp150.000.000,- Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 98.040.000,- (65.36%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

✓ Perlindungan dan Konservasi Alam Di Wilayah KPHL Bukit Barisan.

Hasil : Termonitornya kondisi pengaman dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar kawasan hutan wilayah kelola KPHL bukit barisan. Pagu Dana: Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 46.573.500,- Realisasi keuangan pada

kegiatan ini sebesar Rp 43.976.200,- (94.42%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

XI. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dengan total anggaran sebesar Rp277.575.025,- dan anggaran setelah perubahan sebesar Rp347.469.950,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 213.532.650,- (61.45%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini:

✓ Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan.

Hasil : Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan website kehutanan, pembuatan dokumen statistik kehutanan dan penyebarluasan informasi kehutanan serta rekonsiliasi penguatan sistem informasi kehutanan. Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 180.990.900,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp89.139.900,- (49.25%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

✓ Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan.

Hasil : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan kehutanan, pembinaan DAK bidang kehutanan dan rapat monev. Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp81.008.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp48.865.700,- (60.32%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

✓ Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP

Hasil : Terlaksananya implementasi sosialisasi ISO 9001:2008 pelayanan pada dinas kehutanan provinsi Sumatera Barat, audit internal dan audit eksternal. Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 85.471.050,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 75.527.050,- (88.37%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

XII. Program Pengendalian Kebakaran Hutan, dengan total anggaran Rp253.170.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 220.608.650,- (87.14%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini

✓ Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Hasil : Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan bimbingan teknis kelompok MPA. Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp253.170.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp220.608.650,- (87.14%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

XIII. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, dengan total anggaran Rp 4.416.717.450,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp3.861.809.500,- (87.44%). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini

✓ Rehabilitas Hutan dan Lahan.

Hasil : Terehabilitasinya lahan kritis di daerah penyangga hutan desa/HKm. Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 226.305.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp144.488.000,- (63.185%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

- ✓ Pengembangan Sarana Konservasi Tanah.
Hasil : Terbangunnya bangunan konservasi tanah sebanyak 2 unit.
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp24.500.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp 18.812.650,- (76.79%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL.
Hasil : Terlaksananya monitoring dan pembinaan PHL/reklamasi/DAK oleh Kab/Kota. Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp100.000.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp 87.368.400,- (87.37%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Pembinaan Monitoring Pengelola DAS.
Hasil : Tersedianya buku himpunan peraturan pengelolaan DAS.
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 99.720.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp 51.252.800,- (51.40%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Rehabilitasi Hutan Pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan.
Hasil : Tersedianya dokumen rancangan kegiatan RHL dan terbinanya pelaksanaan rehabilitas DAS oleh pemegang izin. Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 67.721.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp 59.265.800,- (87.51%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (DAK).
Hasil : Terlaksananya penanaman rotan seluas 25 Ha dan pembangunan bank buah seluas 30 Ha. Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 518.146.350,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp498.063.250,- (92.17%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Pada Blok Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan (DAK+APBD)
Hasil : Terlaksananya pembangunan hutan tanaman jabon pada blok pemanfaatan seluas 60 Ha, terpeliharanya rehabilitasi hutan dan lahan kritis penanaman hutan jabon pada blok pemanfaatan tahun 1 seluas 35 Ha. Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.095.508.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp965.891.300,- (88.17%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- ✓ Rehabilitasi Hutan Wilayah Kelola KPHL Bukit barisan (DAK 2016+APBD).
Hasil : Terlaksananya rehabilitasi hutan kritis seluas 125 Ha, terpeliharanya tanaman rehabilitasi hutan hasil penanaman tahun sebelumnya seluas 35 ha serta tersusunnya rancangan kegiatan. Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.332.705.000,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.128.243.800,- (84.66%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

- ✓ Peningkatan Sarana Prasarana Operasional KPHL Bukit Barisan (DAK 2016).
Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana operasional KPHL bukit barisan yaitu berupa kendaraan bermotor beroda dua sebanyak 13 (tiga belas) unit, pengadaan GPS sebanyak 15 (lima belas) unit, pengadaan kompas sebanyak 15 (lima belas) unit, pengadaan alat pemadam kebakaran, pengadaan laptop sebanyak 6 (enam) unit, komputer sebanyak 4 unit dan pengadaan printer sebanyak 4 (empat) unit. Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp952.112.100,-. dengan realisasi keuangan sebesar Rp908.423.500,- (95.41%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Ikhtisar capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung selama tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Program:

- Program dengan kategori sangat baik (capaian kinerja 100%) sebanyak 0 program
- Program dengan kategori baik (capaian kinerja 90% - 100%) sebanyak 3 program (rata-rata 93.25%).
- Program dengan kategori cukup baik (capaian kinerja 80% - 90%) sebanyak 7 program (rata-rata 86.62%).
- Program dengan kategori sedang (capaian kinerja 60%- 80%) sebanyak 1 program (68.54%)
- Program dengan kategori gagal (capaian kinerja 0%-60%) sebanyak 3 program (0.00%)

Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Kegiatan :

- Kegiatan dengan kategori sangat baik (capaian kinerja 100%) sebanyak 9 kegiatan (rata-rata 100%)
- Kegiatan dengan kategori baik (capaian kinerja 90% - 100%) sebanyak 25 kegiatan (rata-rata 96.64%)
- Kegiatan dengan kategori cukup baik (capaian kinerja 80%-90%) sebanyak 14 kegiatan (rata-rata 85.15%).
- Kegiatan dengan kategori sedang (capaian kinerja 60%-80%) sebanyak 14 kegiatan (rata-rata 74.32%).
- Kegiatan dengan kategori gagal (capaian kinerja (0% - 60%) sebanyak 7 kegiatan.

3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pada dasarnya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kehutanan tidak ada, akan tetapi beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya pencapaian target adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Kurang sinkronnya penyusunan rencana waktu pelaksanaan kegiatan dan penarikan dan ketersediaan anggaran.
- c. Kurangnya jumlah, kapasitas dan kemampuan personil pelaksana kegiatan terutama program dan kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat luas.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana dan pembiayaan pendukung pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Kehutanan.
- e. Belum optimalnya kelembagaan forum koordinasi serta peranserta Lembaga, instansi, LSM, kelompok masyarakat, dunia usaha, akademisi dan pemerhati lingkungan yang terkait dalam pembangunan kehutanan.

Beberapa kegiatan yang memiliki realisasi rendah dibawah 90%, penyebabnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- Pagu dana : Rp325.600.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp199.177.281,- (61.17%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp 126.422.719 merupakan anggaran sisa mati. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran yaitu terhadap belanja yang berasal dari belanja telepon Rp 3.795.396- belanja air Rp 5.647.950 belanja listrik Rp 54.903.623- belanja kawat/faksimil/internet/VPN Rp 62.075.750
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Pagu dana :Rp. 1.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp989.323,- (89.94%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp 110.677,- merupakan anggaran sisa mati. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya sisa mati yang berasal dari belanja pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 110.677
 3. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu dana : Rp. 577.670.500,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 461.676.000,- (79.92%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa dana sebesar Rp 115.994.500,- merupakan anggaran sisa mati. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran yaitu terhadap belanja yang berasal dari belanja peralatan/ perlengkapan pakai habis Rp 1.475.000, belanja modal pengadaan alat kantor lainnya Rp 2.103.500,-, belanja modal pengadaan alat rumah tangga Rp43.355.000, belanja modal pengadaan unit alboratorium Rp 69.061.000,-
 4. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah.
Pagu dana : Rp200.000.000,- dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp145.218.216,- (72.61%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 54.781.754 merupakan anggaran sisa mati yang terdiri dari belanja bahan bakar minyak gas Rp 202.400,-, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 8.816.980,- dan perjalanan dinas luar daerah Rp45.762.404,-. Tidak terealisasinya seluruh anggaran yang tersedia dikarenakan adanya penghematan dan efisiensi anggaran.
 5. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Pagu dana Rp10.000.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 7.950.000,- (79.50%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp2.050.000,- terdiri dari belanja jasa publikasi Rp.2.050.000,- Rendahnya realisasi disebabkan karena anggaran yang serupa sudah dianggarkan dalam APBN pada Bidang/BPDAS.
 6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Pagu dana : Rp 196.510.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 142.699.381,- (72.62%) dan realisasi fisik sebesar 90%. Dana yang

tidak terealisasi disebabkan karena adanya penghematan yaitu sebesar Rp53.810.619,- merupakan anggaran sisa mati yang terdiri dari belanja jasa service Rp 3.572.711,-, belanja pergantian suku cadang Rp19.666.573,-, belanja bahan bakar minyak /gas/pelumas Rp6.725.100,-, belanja jasa KIR Rp 800.000,-, belanja pajak kendaraan bermotor Rp23.046.235,- karena dibayarkan sesuai yang tertera di STNK.

7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Pagu dana : Rp 22.600.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 19.550.000,- (86.50%) dan realisasi fisik sebesar 90%. Dana yang tidak terealisasi disebabkan karena adanya penghematan yaitu sebesar Rp3.050.000,- yang berasal dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp3.050.000,-
8. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan
Pagu dana : Rp 178.178.000,- dengan realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 158.881.150,- (89.17%) dan realisasi fisik sebesar 92.50%. Sisa anggaran sebesar Rp 19.296.850,- merupakan anggaran sisa mati yang terdiri dari belanja bakar minyak /gas Rp 2.343.750,-, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 14.540.000,-, serta belanja perjalanan dinas luar daerah Rp2.322.100,-. Penyebab realisasi dibawah 90% adalah disebabkan karena pelaksanaan kegiatannya tergantung pada undangan pelaksana.
9. Kegiatan Penyusun Perencanaan dan Penggaran SKPD
Pagu dana : Rp 76.864.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp39.394.000,- (51.25%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran Rp 37.470.000,- merupakan sisa mati anggaran. Tidak terealisasinya seluruh anggaran disebabkan oleh penghematan yaitu terhadap komponen belanja seminar kit peserta Rp 1.500.000, belanja peralatan perlengkapan kantor Rp 600.000, belanja jasa akomodasi Rp 12.600.000, belanja transportasi Rp 6.000.000, belanja makanan dan minuman Rp8.780.000,- dan honorarium PNS Rp 7.800.000,-.
10. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 74.760.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 34.247.150,- (45.81%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp40.512.850,- merupakan sisa mati anggaran karena adanya penghematan terhadap belanja alat bahan bakar minyak Rp 4.937.750,-, belanja penggandaan Rp 15.100,- dan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 35.920.000,-
11. Kegiatan Pengembangan Industri Hutan Alam dan Hutan Tanaman.
Pagu Dana : Rp 124.945.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 78.826.000,- (63.06%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp 46.119.000,- merupakan sisa mati anggaran karena efisiensi dan penghematan anggaran yang berasal dari belanja bahan bakar minyak/gas Rp 1.073.900, belanja penggandaan Rp 100,- dan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 45.045.000,-.
12. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan
Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp286.040.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp237.829.850,-

(83.15%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran Rp48.210.150,- merupakan anggaran sisa mati karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran yang berasal dari belanja bahan bakar minyak Rp 3.900, belanja transportasi Rp100.000, belanja penggandaan Rp 250, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp44.106.000 serta honorarium PNS Rp 4.000.000,-

13. Kegiatan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan

Pagu Dana: Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp99.838.000,- Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp 82.344.750,- (82.48%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp 17.493.250,- disebabkan karena adanya penghematan terhadap belanja alat tulis kantor Rp 505.500,- belanja bahan bakar minyak/gas Rp1.985.750, belanja sertifikat/ kalibrasi/akreditasi Rp100.000, belanja penggandaan Rp1.300.000,- belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp3.550.000, serta belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 9.742.000,- belanja materai dan lainnya Rp 260.000,- serta belanja cetak Rp 150.000,-

14. Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan

Pagu Dana: Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp125.000.000,- Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp96.282.500,- (77.03%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran Rp28.717.500 merupakan anggaran sisa mati anggaran karena adanya efisiensi dan penghemataan anggaran yaitu terhadap belanja bahan bakar minyak/gas Rp 1.240.500,- belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 17.313.000,- belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 10.164.000,-.

15. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Genetik

Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp100.000.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp53.690.050,- (53.69%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp46.309.950,- merupakan anggaran sisa mati. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran yaitu terhadap belanja bahan bakar minyak/gas Rp 984.950,- belanja penggandaan Rp140.000, belanja sewa sarana mobilitas air Rp 6.750.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 16.993.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp12.442.000, belanja jasa buruh Rp 5.400.000 dan belanja jasa petugas lapangan Rp 3.600.00

16. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan

Pagu Dana: Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp76.325.450,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar

Rp60.745.050,- (79.56%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran Rp 15.607.400,- merupakan sisa mati anggaran yang berasal dari belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 15.607.400,-. Penyebab realisasi dibawah 90% adalah karena adanya penghematan pelaksanaan anggaran terutama terhadap komponen belanja perjalanan dinas.

17. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan HTR dan HN,HKM,dan HR Kemitraan
Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 173.440.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp78.339.500,- (45.17%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran Rp 95.100.500,- merupakan sisa mati anggaran karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran yang berasal dari belanja bahan bakar minyak/gas Rp11.225.500,- belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 8.700.000,- dan belanja perjalanan dinas Rp 75.178.000,-
18. Kegiatan Koordinasi Kelompok Kerja Magrove Daerah.
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 15.705.250,- (31.41%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran sebesar Rp32.294.750,- merupakan sisa mati anggaran. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran yang berasal dari belanja bahan pakai habis Rp 1.480.000 belanja jasa kantor Rp 22.800.000,- belanja penggandaan Rp 1.554.750,- belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp10.000.000,- serta honorarium non PNS Rp8.450.000,-
19. Kegiatan Pengendalian Penggunaan Kawasan Belanja Hutan .
Pagu Dana: Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 146.199.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp129.855.150 (88.82%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran Rp 16.343.850,- merupakan sisa mati anggaran yang berasal dari belanja bahan bakar minyak/gas Rp 345.350,- belanja transportasi Rp 1.500.000,- belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp12.075.000,- belanja jasa buruh/tukang/mandor Rp 2.423.500,-. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran.
20. Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan .
Pagu Dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 325.000.000,-. Realisasi keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp222.141.400,- (68.35%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa anggaran Rp 102.858.600,- merupakan sisa mati anggaran karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran yang berasal dari belanja bahan bakar minyak/gas Rp 6.667.100,- belanja penggandaan Rp2.167.500,- belanja sewa sarana mobilitas darat Rp 2.400.000,- belanja makan dan minum Rp 4.800.000,- belanja perjalanan dinas Rp82.084.000,- dan honorarium PNS Rp 4.730.000,-
21. Kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan.

Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp93.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp 83.215.535,- (88.62%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp10.684.465,- merupakan sisa mati anggaran yang terdiri dari belanja bahan bakar minyak/gas Rp 3.431.750,- belanja pengadaan Rp2.399.600,- belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 2.920.000 belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 973.115, honorarium non PNS Rp960.000, belanja jasa pembuatan peta (manual/tematik/digital) Rp960.000,-. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran

22. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan.

Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp85.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp 68.232.200,- (79.84%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp17.227.800,- merupakan sisa mati anggaran karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran yang berasal dari belanja bahan pakai habis pakai Rp 910.800,- belanja bahan bakar minyak/gas Rp910.800,- belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 2.080.000,- belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 1.925.000,- belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 5.892.000,- honorarium non PNS Rp3.920.000,- belanja jasa buruh/tukang mandor Rp 2.000.000,- belanja jasa pembuatan peta (manual/tematik/digital) Rp 1.920.000,-

23. Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA.

Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp267.069.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 219.510.950,- (82.19%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp47.558.550,- merupakan sisa mati anggaran yang berasal dari belanja bahan pakai habis Rp 10.068.550,- belanja bahan bakar minyak/gas Rp4.546.050,- belanja seminar kit peserta Rp5.000.000,- belanja peralatan/perlengkapan pakai habis Rp 522.500, belanja transportasi Rp8.850.000,- belanja cetak Rp 4.075.000,- belanja pengadaan Rp 5.000, belanja makanan dan minuman Rp 6.730.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 5.318.000,- dan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 6.112.000 serta honorarium PNS Rp 6.400.000,

24. Kegiatan Pengendalin Dampak Perubahan Iklim

Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 98.040.000,- (65.36%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp51.960.000,- merupakan sisa mati anggaran yang berasal dari belanja bahan bakar minyak/gas Rp 3.368.500,- belanja pengadaan Rp 687.100, belanja makanan dan minuman Rp 800.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 40.582.000 dan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 6.522.400,-

25. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan

Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp180.139.900,- dengan realisasi sebesar Rp 89.139.900,- (49.25%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp91.851.000,- merupakan sisa mati anggaran karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran yaitu terhadap belanja bahan percontohan/promosi Rp3.045.000, belanja sewa gedung/kantor/ tempat Rp55.000.000, belanja sewa perlengkapan kantor Rp5.000.000,- belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 220.000 dan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 28.586.000,-

26. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp81.008.000,- dengan realisasi sebesar Rp 48.867.700,- (60.32%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp32.142.300,- merupakan sisa mati anggaran karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran yaitu terhadap belanja bahan bakar minyak Rp 3.819.200, belanja penggandaan Rp 100,- belanja makan dan minum Rp 6.340.000,- belanja pakaian kerja lapangan Rp 1.800.000,- dan belanja perjalanan dinas Rp 20.183.00
27. Kegiatan Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp85.471.050,- dengan realisasi sebesar Rp 75.527.050,- (88.37%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak teralisasi adalah sebesar Rp9.994.000,- merupakan sisa mati anggaran yang berasal dari belanja bahan pakai habis Rp 480.000, belanja peralatan/perlengkapan pakai habis Rp 480.000, belanja jasa kantor Rp1.489.000, belanja transportasi Rp 1.489.000, belanja makanan dan minuman Rp 6.675.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 300.000 dan belanja jasa lembaga sertifikasi Rp 1.000.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran.
28. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp253.170.000,- dengan realisasi sebesar Rp 220.608.650,- (87.14%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak teralisasi adalah sebesar Rp32.561.350,- merupakan sisa mati anggaran karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran yaitu terhadap belanja bahan bakar minyak/gas Rp 5.053.250, belanja transportasi Rp 4.200.000, belanja penggandaan Rp 320.100, belanja makan dan minuman kegiatan Rp1.946.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 14.610.000 dan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 6.432.000,- .
29. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp226.305.000,- dengan realisasi sebesar Rp 144.488.000,- (63.85%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak teralisasi adalah sebesar Rp81.817.000,- merupakan sisa mati anggaran yang berasal dari belanja bahan bakar minyak Rp 15.799.000,- belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 66.018.000. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran.

30. Kegiatan Pengembangan Sarana Konservasi Tanah
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp24.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 18.812.650,- (76.79%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak teralisasi adalah sebesar Rp5.687.350,- merupakan sisa mati anggaran karena penghematan dan efisiensi anggaran yaitu terhadap belanja bahan bakar minyak Rp3.487.350 dan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 2.200.000,-
31. Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Kegiatan RHL
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 87.368.400,- (87.37%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak teralisasi adalah sebesar Rp12.631.600,- merupakan sisa mati anggaran yang berasal dari belanja bahan bakar minyak Rp 5.336.600,- belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 7.295.000,-. Penyebab realisasi keuangan dibawah 90% disebabkan karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran.
32. Kegiatan Monitoring dan Pengelolaan DAS
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp99.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp 51.252.800,- (51.40%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak teralisasi adalah sebesar Rp48.467.200,- merupakan sisa mati anggaran yang berasal dari belanja bahan bakar minyak Rp 7.742.200,- belanja peralatan pakai habis Rp600.000,- belanja penggandaan Rp 4.500.000,- belanja makan dan minum Rp 3.000.000,- belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp29.725.000 dan belanja honorarium ahli Rp 2.900.000,-
33. Kegiatan Rehabilitasi Hutan pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp67.721.000,- dengan realisasi sebesar Rp 59.265.800,- (87.51%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak teralisasi adalah sebesar Rp8.455.200,- merupakan sisa mati anggaran karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran yaitu terhadap belanja bahan bakar minyak Rp 551.200, belanja makanan dan minuman Rp625.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 5.030.000,- dan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 2.249.000,-
34. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada Block Pemanfaatan KPHL Bukit Barisan
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.095.508.800,- dengan realisasi sebesar Rp 965.891.300,- (88.17%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak teralisasi adalah sebesar Rp129.616.700,- merupakan sisa mati anggaran yang berasal dari belanja bahan bakar minyak Rp 4.442.350, belanja bahan material Rp 3.477.500, belanja cetak dan penggandaan Rp. 1.966.850, belanja makan dan minuman Rp 750.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 4.820.000, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 400.000,- dan belanja jasa buruh Rp113.760.000,-.

35. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Kelola KPHL Bukit Barisan
Pagu dana : Dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp1.332.705,- dengan realisasi sebesar Rp 1.128.243.800,- (84.66%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Dana yang tidak teralisasi adalah sebesar Rp204.461.200,- merupakan sisa mati anggaran karena adanya penghematan dan efisiensi anggaran yaitu terhadap belanja bahan bakar minyak Rp 1.240.200, belanja bahan baku bangunan Rp 148.000, belanja cetak dan penggandaan Rp. 75.000, belanja makan dan minuman Rp 750.000, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp2.547.000, belanja jasa pembuatan dan pemeliharaan tanaman Rp200.451.000,-.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode. Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi : a) Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, b) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, c) Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi : a) Tujuan kebijakan akuntansi, definisi dan pengertian; b) Lingkungan akuntansi pemerintahan daerah; c) Pengguna dan kebutuhan informasi pengguna; d) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan; e) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum; f) Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsi-prinsip serta kendala informasi akuntansi; g) Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan dan pengukurannya; h) Jenis, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor : 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2011 bulan Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2016 adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat : a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau b) Diterima oleh SKPD; atau c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah , Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya, dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang diakui saat: a) Diterbitkan surat ketetapan; atau b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang dicatat dan diukur sebesar: a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*).

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat

dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini

meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, dan tanaman, peralatan dan bahan konstruksi (seperti rangka jembatan,dll yang bisa dibuka pasang). Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Terhadap hewan yang telah dikembangbiakkan dimaksud untuk dijual kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.
- Biaya rehab terhadap aset renovasi diberlakukan sebagai berikut:
 - 1) Untuk rehab terhadap gedung dan bangunan yang dianggarkan dibelanja modal terhadap Aset Tetap Renovasi atau terhadap Aset Tetap yang bukan milik Pemerintah Provinsi, maka pada akhir tahun dikeluarkan dari Aset Tetap dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengelola Aset Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagai pemilik Aset tetap tersebut. Jika sampai akhir tahun, belum diserahkan dengan dokumen pendukung yang lengkap, maka dicatat pada Aset tetap Renovasi SKPD yang melakukan rehab tersebut. Namun pada kesempatan pertama di tahun selanjutnya segera untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing2 pemilik Aset Tetapnya.
 - 2) Untuk rehab terhadap gedung dan bangunan yang dianggarkan dibelanja modal terhadap Aset Tetap Renovasi atau terhadap Aset Tetap yang bukan SKPD sendiri tetapi milik SKPD lain dilingkungan Pemerintah Provinsi, maka pada akhir tahun dikeluarkan dari Aset Tetap dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang yang merehab ke Pengelola dan dilanjutkan ke Pengguna Barang yang memiliki Aset tetap tersebut.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

L. Penyusutan Aset Tetap

- Mulai Tahun 2014 penyusutan telah dilakukan terhadap aset tetap berupa : Gedung dan Bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya
- Nilai yang dapat disusutkan adalah :
 - Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.
 - Nilai buku merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan
 - Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

2. Pengukuran/ Penilaian Kewajiban

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas: a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); b) Pendapatan Diterima Dimuka; c) Utang Beban; dan d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban diakui pada saat:

- a) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c) Pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran/ Penilaian Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal

ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

4. Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a) Diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
- b) Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu SKPD
- c) Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

5. Pengukuran/ Penilaian Belanja

1. Pengakuan Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

2. Pengukuran belanja

Belanja diukur sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD berdasarkan azas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

6. Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LO :

- a) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
- b) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

7. Pengukuran/ Penilaian Beban

Pengakuan Beban Pada SKPD

A. Beban Pegawai

Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS.

- 1) Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan/disetujui oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
- 2) Dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui pada saat dicairkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 3) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas

B. Beban Barang

- 1) Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti-bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK-SKPD yang terangkum dalam surat pengesahan pertanggungjawaban yang disahkan/disetujui oleh PA/KPA.
- 2) Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ditandatangani oleh Panitia Penerima Barang, dimana mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang dikelola oleh penyimpan barang/belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

C. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun, disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah yaitu Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap lainnya dan aset lainnya. Sedangkan amortisasi dibebankan terhadap aset tidak berwujud.

D. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki pemerintah daerah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 maka tahun 2014 telah dilakukan penyusutan aset tetap pertama kali sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No.05 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	40.261.000,0	48.490.008,0	120.	46.492.704,
		0	0	44	00
	-Pendapatan Retribusi Daerah	40.261.000,0	48.490.008,0	120,	46.492.704,
		0	0	44	00

1. Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi tahun 2016 mencapai 120.44% dari anggarannya. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015, maka terdapat peningkatan sebesar Rp 1.997.304,00. Peningkatan jumlah pendapatan retribusi daerah dari tahun sebelumnya disebabkan karena beberapa rumah dinas yang sebelumnya kosong disebabkan oleh pegawai yang sudah pensiun atau pindah rumah, maka selama tahun 2016 rumah dinas yang kosong tersebut sudah dihuni kembali oleh PNS yang masih aktif pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sehingga setoran sewa rumah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjadi meningkat.

Pendapatan ini terdiri dari: 1.1.2.15.001 Penyewaan Tanah dan Bangunan

Penerimaan pendapatan Penyewatan Tanah dan Bangunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
a.	Belanja Pegawai	10.971.740.71	10.580.205.29	96.4	10.459.507.99
b.	Belanja Barang dan Jasa	8,00	0,00	3	0,00
		9.709.121.100,		82.9	6.808.085.629,

		00	8.054.757.461, 00	6	00
	Jumlah	20.680.861.81 8,00	18.634.962.75 1,00	90.1 1	17.267.593.61 9,00

a. Belanja Pegawai

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
a.	Belanja Pegawai Tidak Langsung	10.971.740.71 8,00	10.580.205.29 0,00	96.4 3	10.459.507.99 0,00
b.	Belanja Pegawai Langsung	-	-	-	-
	JUMLAH	10.971.740.71 8,00	10.580.205.29 0,00	96.4 3	10.459.507.99 0,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi Tahun 2016 mencapai 96.43% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp 120.697.300,00, hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 ada pembayaran gaji ke-14 sebagai pengganti pembayaran THR dan pembayaran gaji ke-14 tersebut adalah sebesar gaji pokok. Realisasi belanja pegawai tahun 2016 merupakan belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS, dengan rincian objek belanja sebagai berikut :

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
i.	Belanja Pegawai Tidak Langsung	10.971.740.71 8,00	10.580.205.29 0,00	96.4 3	10.459.507.990,00
A	Belanja Gaji dan Tunjangan	8.316.532.918,00	8.149.217.355,00	97.99	7.727.978.045,00
1	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	6.651.980.440,00	6.521.233.100,00	99.38	5.998.397.400,00
2	Tunjangan Keluarga	631.603.000,00	590.149.424,00	93.44	586.970.962,00
3	Tunjangan Jabatan	327.740.000,00	301.090.000,00	91.87	304.330.000,00
4	Tunjangan Fungsional	167.160.000,00	155.220.000,00	92.86	155.220.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum	227.024.998,00	206.230.000,00	90.84	209.960.000,00
6	Tunjangan Beras	358.044.480,00	335.304.600,00	93.65	355.735.560,00

6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	42.880.000,00	39.901.164,00	93.05	117.244.128,00
8	Pembulatan Gaji	110.000,00	89.067,00	80.97	119.995,00
B	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.654.000.000,00	2.430.987.935,00	91.60	2.731.529.945,00
1	Tamb. Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.450.000.000,00	2.430.987.935,00	99.22	2.469.329.945,00
2	Tamb. Penghasilan Berd. Pertimbangan Objektif	204.000.000,00	-	-	262.200.000,00
C	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.207.800,00	-	-	-
	Jml Blj Pegawai Tdk Langsung	10.971.740.718,00	10.580.205.290,00	96.43	10.459.507.990,00

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto, serta tidak ada pengembalian belanja pegawai selama tahun 2016.

b. Belanja Barang & Jasa

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1	Belanja Barang dan Jasa	9.709.121.100,00	8.054.757.461,00	82.96	6.808.085.629,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2016 dan 2015. Untuk realisasi tahun 2016 mencapai 82.96% dari anggarannya dan sisa anggaran belanja barang dan jasa adalah sebesar Rp1.654.363.639,00. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp1.246.671.832,00.

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

NO	PERKIRAAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	%	TAHUN 2015
A	Belanja Bahan Pakai Habis	576.124.500,00	460.923.650,00	80,00	526.923.637,00
1	Belanja alat tulis kantor	115.688.250,00	115.167.850,00	99,55	104.428.700,00
2	Belanja alat listrik dan elektronik	10.000.000,00	9.987.000,00	99,87	8.993.450,00
3	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	8.330.000,00	8.070.000,00	96,88	9.726.000,00

4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	229.783.000,00	127.653.050,00	55.55	182.791.687,00
5	Belanja Seminar Kit Peserta	21.875.000,00	14.375.000,00	65.71	4.250.000,00
6	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	190.448.250,00	185.670.750,00	97.49	216.733.800,00
B	Belanja Bahan/Material	981.515.900,00	962.703.250,00	98.08	1.205.867.850,00
1	Belanja bahan baku bangunan	227.573.000,00	215.468.000,00	94.68	324.015.550,00
2	Belanja bahan/bibit tanaman	666.999.000,00	663.336.350,00	99.45	726.503.900,00
3	Belanja bahan obat-obatan	1.400.000,00	1.400.000,00	100.00	666.400,00
4	Belanja bahan kimia	79.543.900,00	79.543.900,00	100.00	147.757.000,00
5	Belanja Bahan Percontohan/Promosi	6.000.000,00	2.955.000,00	49.25	6.925.000,00
C	Belanja Jasa Kantor	555.259.000,00	366.477.604,00	66.00	343.024.557,00
1	Belanja telepon	12.000.000,00	8.204.604,00	68.37	7.483.521,00
2	Belanja air	20.000.000,00	14.352.050,00	71.76	11.177.300,00
3	Belanja listrik	170.000.000,00	115.096.377,00	67.7	124.777.594,00
4	Belanja surat kabar/majalah	12.000.000,00	10.958.000,00	91.32	9.496.500,00
5	Belanja kawat/faksimili/internet/VPN	123.600.000,00	61.524.250,00	49.78	50.466.719,00
6	Belanja paket/pengiriman	120.000,00	120.000,00	100.00	120.000,00
7	Belanja Jasa Publikasi	2.450.000,00	400.000,00	16.33	7.500.000,00
8	Belanja jasa akomodasi	52.285.000,00	29.793.000,00	56.98	35.462.000,00
9	Belanja pajak bumi dan bangunan	1.100.000,00	989.32300	89.94	989.32300
10	Belanja Transportasi	161.704.000,00	125.040.000,00	77.33	90.851.600,00
D	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	196.510.000,00	142.699.381,00	72.62	143.128.295,00
1	Belanja Jasa Service	30.035.000,00	26.462.289,00	88.1	20.269.038,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	85.000.000,00	65.333.427,00	76.86	68.175.385,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	40.500.000,00	33.774.900,00	83.39	39.225.318,00
4	Belanja Jasa KIR	800.000,00	-	-	-
5	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	40.175.000,00	17.128.765,00	42.64	15.458.554,00
E	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.051.050,00	198.024.700,00	89.58	202.385.750,00
1	Belanja cetak	96.771.800,00	92.246.000,00	95.32	106.355.000,00
2	Belanja Penggandaan	124.279.250,00	105.778.700,00	85.11	96.030.750,00
F	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	82.500.000,00	27.500.000,00	33.33	50.000.000,00
1	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	80.000.000,00	25.000.000,00	31.25	49.000.000,00
2	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	100.00	1.000.000,00
G	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.900.000,00	750.000,00	7.58	12.650.000,00
1	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	-	-	12.650.000,00
2	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	7.500.000,00	750.000,00	10.00	
H	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	10.000.000,00	66.67	27.000.000,00
1	Belanja sewa taman/bunga untuk taman hias	10.000.000,00	5.000.000,00	50.00	10.000.000,00
2	Belanja sewa bandwidth	5.000.000,00	5.000.000,00	100	17.000.000,00

I	Belanja Makanan dan Minuman	226.670.000,00	168.476.000,00	74.33	208.923.500,00
1	Belanja makanan dan minuman rapat	50.125.000,00	30.770.000,00	61.39	53.857.500,00
2	Belanja makanan dan minuman kegiatan	159.025.000,00	123.114.000,00	77.42	129.170.000,00
3	Belanja makanan dan minuman Harian Pengaman	17.520.000,00	14.592.000,00	83.29	25.896.000,00
J	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	83.160.000,00	82.852.000,00	99.63	74.643.000,00
1	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	83.160.000,00	82.852.000,00	99.63	74.643.000,00
K	Belanja Pakaian Kerja	19.450.000,00	17.650.000,00	90.75	68.540.000,00
1	Belanja pakaian kerja lapangan	19.450.000,00	17.650.000,00	90.75	68.540.000,00
L	Belanja Perjalanan Dinas	3.386.366.150,00	2.642.706.751,00	78.04	2.515.150.800,00
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.867.400.150,00	2.293.623.970,00	79.99	2.120.456.600,00
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	518.966.000,00	349.082.781,00	67.27	394.694.200,00
M	Belanja Pemeliharaan	336.920.500,00	331.910.600,00	98.51	107.670.000,00
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.190.900,00	72.181.000,00	93.51	31.720.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	259.729.600,00	259.729.600,00	100.00	75.950.000,00
N	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	100.00	13.750.000,00
1	Belanja Pelatihan.	4.500.000,00	4.500.000,00	100.00	13.750.000,00
O	Belanja Jasa Lembaga	233.500.000,00	232.496.800,00	99.57	94.499.000,00
1	Belanja jasa lembaga sertifikasi	17.500.000,00	16.500.000,00	94.29	16.500.000,00
2	Belanja jasa lembaga pengamanan	216.000.000,00	215.996.800,00	100.00	77.999.000,00
P	Honorarium PNS	249.184.000,00	231.880.000,00	93.06	320.750.000,00
1	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.100.000,00	-	-	
2	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.650.000,00	27.850.000,00	70.24	125.300.000,00
3	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	151.134.000,00	150.030.000,00	99.27	166.350.000,00
4	Honorarium Pengelola Asset Daerah	25.500.000,00	25.200.000,00	98.82	
5	Honorarium Pengelola SIPKD	18.000.000,00	18.000.000,00	100	18.000.000,00
6	Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	100	5.100.000,00
7	Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD	6.000.000,00	6.000.000,00	100	6.000.000,00
Q	Honorarium Non PNS	1.069.452.725,00	911.672.725,00	85.25	798.379.240,00
1	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	55.950.000,00	42.650.000,00	76.23	6.500.000,00
2	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	66.820.000,00	66.820.000,00	100.00	66.820.000,00
3	Honorarium Pengelola SIPKD	12.000.000,00	12.000.000,00	100.00	12.000.000,00
4	Belanja Jasa Moderator	13.000.000,00	9.000.000,00	69.23	7.500.000,00
5	Belanja Jasa Pengawas	14.400.000,00	14.400.000,00	100.00	55.200.000,00
6	Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor	836.060.000,00	706.220.000,00	84.47	588.949.240,00
7	Belanja Jasa Pembuatan Peta (Manual/Tematik/Digital)	17.520.000,00	13.280.000,00	75.80	22.560.000,00
8	Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1.050.000,00	750.000,00	71.43	1.100.000,00

9	Belanja Pembaca Doa/Al-Quran	4.750.000,00	3.600.000,00	75.79	4.350.000,00
10	Belanja Jasa Sopir	25.152.725,00	25.152.725,00	100.00	21.000.000,00
11	Belanja Jasa Peliputan	1.350.000,00	-	-	1.850.000,00
12	Belanja Jasa Penceramah/Rohaniwan	5.000.000,00	5.000.000,00	100.00	5.750.000,00
13	Belanja Jasa Petugas Lapangan	14.400.000,00	10.800.000,00	75.00	
14	Honorarium Pengelola SIMBANGDA	2.000.000,00	2.000.000,00	100.00	
Q	Belanja Kontribusi	7.000.000,00	7.000.000,00	100.00	
1	Belanja Kontribusi Pelatihan/Magang	7.000.000,00	7.000.000,00	100.00	
R	Belanja Jasa Lainnya.	1.455.057.275,00	1.254.534.000,00	86.22	94.800.000,00
1	Belanja Jasa Cleaning Service	210.517.275,00	210.445.000,00	99.97	94.800.000,00
2	Belanja Jasa Pembuatan dan Pemeliharaan Tanaman	1.244.540.000,00	1.044.089.000,00	83.89	
	JUMLAH	9.709.121.100,00	8.054.757.461,00	82,96	6.808.085.629,00

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto, serta tidak ada pengembalian belanja barang dan jasa selama tahun 2016.

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1	Belanja Modal	5.860.719.325 ,00	5.515.381.47 5	94.1 1	554.010.000 ,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2016 dan 2015 . Realisasi tahun 2016 mencapai 94.11% dari anggarannya. Sisa belanja modal adalah sebesar Rp 345.337.850,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar Rp 4.961.371.475,00 karena terdapat peningkatan belanja modal kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) serta adanya pembangunan gedung kantor pada tahun 2016. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Adapun daftar rincian belanja modal adalah sebagai berikut :

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
A	Belanja Modal	3.422.453.825	3.253.095.47	95.0	554.010.00

	Peralatan & Mesin	,00	5,00	5	0,00
B	Belanja Modal Gedung & Bgn	2.438.265.500,00	2.262.286.000,00	92.78	-
	Jumlah	5.860.719.325,00	5.515.381.475,00	94.11	554.010.000,00

A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
A.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.422.453.825,00	3.253.095.475,00	95.05	554.010.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 95.05% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan/penurunan sebesar Rp 2.699.085.475,00

Adapun rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2016 terdiri dari :

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Sisa Anggaran
A	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.646.878.525,00	1.604.584.275,00	97.43	42,294,250.00
1	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.171.310.250,00	1.169.160.000,00	99.82	2,150,250
2	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	475.568.275,00	435.424.275,00	91.56	40,144,000.00
B	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	176.331.000,00	176.220.000,00	99.94	111,000
1	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	176.331.000,00	176.220.000,00	99.94	111,000
C	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	30.400.000,00	21.400.000,00	70.39	9,000,000.00
1	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	30.400.000,00	21.400.000,00	70.39	9,000,000.00

D	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	326.845.500,00	324.742.000,00	99.36	2,103,500.00
1	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	326.845.500,00	324.742.000,00	99.36	2,103,500.00
E	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	344.178.750,00	298.642.000,00	86.77	45,536,750.00
1	Belanja modal Pengadaan Meubelair	121.588.500,00	121.588.500,00	100.00	
2	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	27.875.000,00	-	-	27,875,000.00
3	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	27.000.000,00	11.520.000,00	42.67	15,480,000.00
4	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	167.715.250,00	165.533.500,00	98.7	2,181,750.00
F	Belanja Modal Pengadaan Sistim Komputer	439.587.050,00	438.335.200,00	99.72	1,251,850.00
1	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	296.028.620,00	294.804.620,00	99.59	1,224,000.00
2	Belanja Modal Pengadaan Printer	143.558.430,00	143.530.580,00	99.98	27,850.00
G	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	69.850.000,00	69.850.000,00	100.00	
1	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	69.850.000,00	69.850.000,00	100.00	
H	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	227.683.000,00	227.683.000,00	100.00	
1	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	222.183.000,00	222.183.000,00	100.00	
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Mesin Faksimili	5.500.000,00	5.500.000,00	100.00	
I	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	160.700.000,00	91.639.000,00	57.02	69,061,000.00
	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	160.700.000,00	91.639.000,00	57.02	69,061,000.00
	JUMLAH	3.422.453.825,00	3.253.095.475,00	95.05	169.358.350,00

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ini, sejumlah Rp. 27.956.500,- tidak dikapitalisir/dikoreksi dari asset tetap yaitu berupa pengadaan terali (besi pengaman).

Belanja modal ini tidak dikapitalisir karena nilai satuannya dibawah Rp 1.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Banyaknya Barang	Harga Satuan (Rp)	Jml Barang (Rp)
1	Pengadaan Terali (Besi Pengaman)/Teralis Atas	54 kolom	192,500	10,395,000
2	Pengadaan Terali (Besi Pengaman)/Teralis Jendela	31 kolom	374,000	11,594,000

3	Pengadaan Terali (Besi Pengaman)/Teralis Bawah	31 kolom	192,500	5,967,500
	Jumlah			27.956.500

B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
1.	Belanja Modal Gedung dan Bgn	2.438.265.500,00	2.262.286.000,00	92.78	-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2016 dan tahun 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 92.78% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar 100%.

Adapun rincian objek belanja modal Gedung Dan Bangunan terdiri dari:

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Sisa Anggaran
1	BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.438.265.500,00	2.262.286.000,00	92.78	175.979.500,00
a.	BM Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.572.265.500,00	1.482.916.000,00	94.32	89.349.500,00
b.	BM Pengadaan Bangunan Gudang	750.000.000,00	663.370.000,00	88.45	86.630.000,00
c.	BM Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	-
d.	BM Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	2.438.265.500,00	2.262.286.000,00	92.78	175.979.500,00

Sisa belanja modal gedung dan bangunan sejumlah Rp 175.979.500,- adalah sisa dari anggaran belanja modal pengadaan gedung kantor senilai Rp 89.349.500,- dan sisa belanja modal pengadaan bangunan gudang senilai Rp 86.630.000,-.

Daftar Belanja Modal Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tidak dikapitalisirnya belanja modal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0,00
Persediaan	23.207.650,00	33.171.935,00
Jumlah Aset Lancar	23.207.650,00	33.171.935,00

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015. Sampai dengan 31 Desember 2016, sisa UYHD sebesar Rp. 897.805.076,-, telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2016. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	6.828.200.062,00	6.828.200.0062,00	-

Penambahan adalah penerimaan Uang Persediaan (UP) tahun anggaran 2016 sebesar Rp1.534.000.000,- dan total penerimaan SP2D GU Tahun 2016 sebesar Rp5.294.200.062,-

Pengeluaran adalah belanja langsung berdasarkan pengesahan spj bulan Januari s.d Desember 2016 sebesar Rp 5.930.394.986,- dan penyetoran sisa UYHD ke kas daerah sebesar Rp.897.805.076,- pada tanggal 30 Desember 2016

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 dan 2015. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Penerimaan	-	48.490.008,00	48.490.008,00	-

Penambahan adalah jumlah pendapatan/penerimaan sewa rumah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sebesar Rp 49.490.008,-

Pengurangan adalah sejumlah pendapatan yang disetorkan ke kas daerah setiap awal bulannya.

3. Beban Dibayar Dimuka

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Beban dibayar dimuka	2.123.175,00	0.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu beban barang dibayar dimuka berupa beban pajak kendaraan bermotor sebanyak 4 (empat) kendaraan yaitu kendaraan bermotor roda 4 (empat) BK 8734 J sebesar Rp 1.742.175,-, kendaraan roda 2 (dua) BK 2604 L sebesar Rp 127.000,-, kendaraan roda 2 (dua) BK 2605 L sebesar Rp 127.000,- dan kendaraan roda 2 (dua) BK 2606 L sebesar Rp 127.000,-. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016 pada rekening belanja pajak kendaraan bermotor senilai Rp 17.128.765,00 maka yang menjadi beban pajak kendaraan bermotor tahun 2016 adalah senilai Rp 15.005.590,- dan yang menjadi beban tahun 2017 adalah senilai Rp 2.123.175,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka	-	2.123.175,00	-	2.123.175,00,-

Penambahan beban dibayar dimuka senilai Rp 2.123.175,00 adalah berasal dari belanja pajak kendaraan bermotor yang seharusnya menjadi beban tahun 2017.

Daftar beban dibayar dimuka dapat dilihat pada lampiran 11.

4. Persediaan

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Persediaan	23.207.650,00	33.171.935,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
A. Persediaan Bahan Pakai Habis	-	-	-	-
1.Persed ATK	26.331.210,00	30.779.740,00	36.201.800,00	20.909.150,00
2.Persed Alat Listrik dan Elektronik	1.810.725,00	773.500,00	1.285.725,00	1.298.500,00

3. Persed Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	111.000,00	-	111.000,00	0,00
4. Persed BBM/Gas	2.226.500,00	-	2.226.500,00	0,00
B. Persediaan Bahan/ Material				
1. Persed Bahan Dokumentasi	2.692.500,00	10.029.500,00	11.722.000,00	1.000.000,00
Total Persediaan	33.171.935,00	41.582.740,00	51.547.025,00	23.207.650,00

Daftar persediaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Tanah	33.944.327.600,00	34.431.927.600,00
Peralatan dan Mesin	8.791.072.170,18	5.590.995.328,00
Gedung dan Bangunan	6.798.468.842,00	4.835.861.822,00
Aset Tetap Lainnya	366.684.500,00	1.398.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.000.000,00	15.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	(4.949.774.874,42)	(3.891.697.347,09)
Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.549.376.508,19)	(2.444.083.327,61)
JUMLAH ASET TETAP	42.416.401.729,57	38.539.402.075,30

5. Tanah

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Tanah	33.944.327.600,00	34.431.927.600,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp. 31.787.880.000,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2016	Rp. 2.136.047.600,00
c. Appraisal 2011	Rp. -
d. Appraisal 2012	Rp. -
e. Appraisal 2013	Rp. -
f. Appraisal 2014	Rp. -
g. Appraisal 2015	Rp. -
h. Appraisal 2016	Rp. 20.400.000,00

Daftar Tanah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	34.431.927.600, 00	20.400.000,00	508.000.000,0 0	33.944.327.60 0,00

Saldo Audited 2015

**34.431.927.600,
00**

Mutasi Tambah

Koreksi tambah nilai sesuai appraisal 20.400.000,00

Total Mutasi Tambah 20.400.000,00

Mutasi Kurang

Reklas ke Aset Lainnya/ 508.000.000,00

Aset Tidak Bermanfaat

Total Mutasi Kurang 508.000.000,00

**Total Mutasi (487.600.000,00
)**

**Saldo per 31 Des 2016 33.944.327.600,
00**

Penjelasan Mutasi Tambah:

Koreksi tambah nilai senilai Rp 20.400.000,00 merupakan hasil penilaian aset berupa tanah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Tim Penilaian Aset Tanah dan Bangunan serta Barang Inventaris Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1421-2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Hasil Penilaian Aset Berupa Tanah dan Bangunan Dinas Kehutanan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu terdiri dari :

N o	Nama Barang	Lokasi/Alamat	Tahun Perole- han	Harga Perolehan	Keterangan
1	Tanah (luas 300 m2)	Sarilamak Labo Panjang Ketinggian Kec. Harau Kab.50 Kota	2000	14.400.000, 00	Eks Kantor KRPH
2	Tanah (luas 300 m2)	Jl. Pasar Baru Pangkalan Selatan	2001	6.000.000,00	Eks Kantor KRPH
	JUMLAH			20.400.000, 00	

Penjelasan Mutasi Kurang :

Hibah tanah kepada kabupaten Pasaman senilai Rp 508.000.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman No.030/150/BAST/BPAD-2016 serta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1043-2016 Tanggal 9 September 2016 yaitu tanah bangunan kantor pemerintah yang beralamat di Jl. Raya Bukittinggi Medan Nagari Tarung-Tarung Pasaman seluas 237 m2.

Rekapitulasi/daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2016, dapat dilihat pada Lampiran 17.

6. Peralatan dan Mesin

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Peralatan dan Mesin	8.791.072.170,18	5.590.995.328,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015.

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp. 1.394.708.563,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2016	Rp. 7.396.363.607,18
c. Appraisal 2011	Rp. -
d. Appraisal 2012	Rp. -
e. Appraisal 2013	Rp. -
f. Appraisal 2014	Rp. -
g. Appraisal 2015	Rp. -

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	5.590.995.328,00	3.529.662.475,00	329.585.632,82	8.791.072.170,18
Akum Peny Peralatan dan Mesin	3.891.697.347,09	1.352.516.160,15	294.438.632,82	4.949.774.874,42
Nilai Buku	1.699.297.980,91	2.177.146.314,85	35.147.000,00	3.841.297.295,76

Saldo Audited 2015

	5.590.995.328,
	00
<u>Mutasi Tambah</u>	
Belanja Modal tahun 2016	3.253.095.475,00
Hibah dari Pihak Ketiga	189.200.000,00
Mutasi antar SKPD	87.367.000,00
Total Mutasi Tambah	3.529.662.475,00
<u>Mutasi Kurang</u>	
BM Tidak Dikapitalisir	27.956.500,00
Reklas ke Aset Tetap	6.495.500,00
Lainnya	295.133.632,82
Reklas ke Aset Lainnya	
Total Mutasi Kurang	329.585.632,82,00
Total Mutasi	3.200.076.842,18
Saldo per 31 Des 2016	8.791.072.170,18

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.253.095.475,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp.189.200.000,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. BA.30/Menhut-II/ KUM/2014 Tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 189.200.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merk/ Type	Jml (Unit)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Minibus	Isuzu New Panther Touring	1	2005	189.200.000,00	189,200,000,00
	Jumlah				189.200.000,00	189.200.000,00

- c) Mutasi antar SKPD senilai Rp 87.367.000,- terdiri atas :

1. Mutasi antar SKPD senilai Rp 6.292.000,00 yaitu dari Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat No.030/20/I/BASTBPAD-2016 Tanggal 11 Januari 2016, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merk/ Type	Jml (Unit)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Scanner	Plustek	1	2015	2.200.000	550.000
2	Smartphone	Asus	1	2015	4.092.000	818.400
	Jumlah				6.292.000	1.368.400

2. Mutasi antar SKPD senilai Rp 66.700.000,- yaitu dari Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah No.030/97/BAST/V/BPAD-2016 Tanggal 20 Mei 2016, dengan perincian :

No	Nama Barang	Lokasi/Alamat	Jml Unit	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Labelisasi Plang Tanah	Kec. Tanjung Harapan Kota Solok	1	2015	2,900,000	580,000
2	Labelisasi Plang Tanah	Nagari Kandang Baru Kab.Sijunjung	1	2015	2,900,000	580,000
3	Labelisasi Plang Tanah	Nagari Kumanis Kabupaten Sijunjung	1	2015	2,900,000	580,000
4	Labelisasi Plang Tanah	Jl. Jendral Sudirman Kabupaten Sijunjung	1	2015	2,900,000	580,000
5	Labelisasi Plang Tanah	Jl. Raya Kamang Baru Kabupaten Sijunjung	1	2015	2,900,000	580,000
6	Labelisasi Plang Tanah	Jl. Raya Kamang Baru Kabupaten Sijunjung	1	2015	2,900,000	580,000
7	Labelisasi Plang Tanah	Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya	1	2015	2,900,000	580,000
8	Labelisasi Plang Tanah	Jl. Pemuda Kab. Pesisir Selatan	1	2015	2,900,000	580,000
9	Labelisasi Plang Tanah	Kec. Pancung Soal Kab.Pesisir Selatan	1	2015	2,900,000	580,000
10	Labelisasi Plang Tanah	Desa Api-api Kab.Pesisir Selatan	1	2015	2,900,000	580,000
11	Labelisasi Plang Tanah	Lunang Silaut Kab.Pesisir Selatan	1	2015	2,900,000	580,000
12	Labelisasi Plang Tanah	Rasuna Said, KoTa Payakumbuh	1	2015	2,900,000	580,000
13	Labelisasi Plang Tanah	Pangkalan Koto Baru Koab. 50 Kota	1	2015	2,900,000	580,000
14	Labelisasi Plang Tanah	Kec. Gunung Mas Kab. 50 Kota	1	2015	2,900,000	580,000
15	Labelisasi Plang Tanah	Padang Matinggi Kab.Pasaman	1	2015	2.900,000	580,000
16	Labelisasi Plang Tanah	Simpang Tugu Rao Kab.Pasaman	1	2015	2,900,000	580,000

17	Labelisasi Plang Tanah	Padang Matinggi Rao Kab. Pasaman	1	2015	2,900,000	580,000
18	Labelisasi Plang Tanah	Palupuh Km 11 Kabupaten Agam	1	2015	2,900,000	580,000
19	Labelisasi Plang Tanah	Manggopoh Desa Balingka Kab. Agam	1	2015	2,900,000	580,000
20	Labelisasi Plang Tanah	Nagari Limo Kaum Kab. Tanah Datar	1	2015	2,900,000	580,000
21	Labelisasi Plang Tanah	Nagari Limo Kaum Kab. Tanah Datar	1	2015	2,900,000	580,000
22	Labelisasi Plang Tanah	Sei Pagu Pantai Cermin Kab. Solok	1	2015	2,900,000	580,000
23	Labelisasi Plang Tanah	Ujung Gading Kabupaten Pasaman	1	2015	2,900,000	580,000
	Jumlah				66.700.000	13.340.000

3. Mutasi antar SKPD senilai Rp 14.375.000,- yaitu dari Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah No.030/225/Bast/XII/BPAD-2016 Tanggal 21-12-2016, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Lokasi/Alamat	Jml (Unit)	Th Perolehan	Nilai Perolehan
1	Labelisasi Plang Tanah	Jl. Raya Sago Kanagarian Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan	1	2016	2,875,000
2	Labelisasi Plang Tanah	Jl. Gajah Mada Gg Mahoni No.252, Naggalo Padang	1	2016	2,875,000
3	Labelisasi Plang Tanah	Jl. Beringin III No.249, Kel Lolong Belanti Padang	1	2016	2,875,000
4	Labelisasi Plang Tanah	Blkg SDN 18, Kel Silaing Bawah, Kota Pdg Panjang	1	2016	2,875,000
5	Labelisasi Plang Tanah	Jl. Bukittinggi Payakumbuh, Kel Padang Tarok, Kec. Baso Kab. Agam	1	2016	2,875,000
	Jumlah				14.375.000

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Belanja Modal yang tidak dikapitalisir senilai Rp 27.956.500 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Reklas ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp 6.495.500,00 yaitu berupa Plang Nama Kantor UPTD KPHL. Plang nama kantor UPTD KPHL termasuk ke dalam kategori Aset Tetap Renovasi karena merupakan partisi dari gedung/bangunan kantor UPTD KPHL yang bukan milik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Merk/ Type	Jml (Unit)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	Plang Nama UPTD KPHL Bukit Barisan	-	1	2016	6,495,500

	Jumlah				6.495.500
--	---------------	--	--	--	------------------

- c) Reklas ke Aset Lainnya senilai Rp 295.133.632.82 berdasarkan SK Gubernur Nomor. 030-1392-2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merk/Type	Jml Unit	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	GPS	-	2	2010	15.100.000,00	15.100.000,00
2	Filling Kabinet	Presiden	1	1985	405.667,00,00	405.667,00,00
3	Filling Kabinet	Presiden	2	1985	624.000,00	624.000,00
4	Filling Kabinet	Presiden	2	1985	624.000,00	624.000,00
5	Filling Kabinet	Presiden	3	1985	1.216.999,50	1.216.999,50
6	Filling Kabinet	Presiden	1	1985	405.555,50	405.555,50
7	Filling Kabinet	Presiden	1	1985	405.667,00	405.667,00
8	Tempat Tidur	Matras O	2	2009	9.990.000,00	9.990.000,00
9	Meja Tulis	Lokal	2	1990	561.590,00	561.590,00
10	Meja Tulis	Lokal	1	1990	280.795,00	280.795,00
11	Meja Tulis	Lokal	1	1990	280.794,91	280.794,91
12	Meja Tulis	Lokal	1	1990	280.794,91	280.794,91
13	Meja Tulis	Lokal	1	1990	280.795,00	280.795,00
14	Kursi Rapat	Futura	2	2008	680.000,00	680.000,00
15	Kursi Putar	Futura	2	1995	549.092,00	549.092,00
16	Kursi Putar	Futura	2	1997	422.332,00	422.332,00
17	Kursi Biasa	Ligna	2	1995	156.000,00	156.000,00
18	Kursi Biasa	Olympic	1	2009	395.000,00	395.000,00
19	Kursi Makan	Chitose	10	1989	528.000,00	528.000,00
20	Kursi Lipat	Chitose	2	1996	105.600,00	105.600,00
21	Kursi Lipat	Chitose	1	1996	52.800,00	52.800,00
22	AC	LG	2	2008	14.300.000,00	14.300.000,00
23	AC Splite	General	1	2005	7.618.600,00	7.618.600,00
24	AC Splite	General	2	2005	15.237.200,00	15.237.200,00
25	Pesawat TV	Gold	1	1998	500.000,00	500.000,00
26	Komputer		1	2003	19.872.000,00	19.872.000,00
27	Komputer		1	2005	6.242.500,00	6.242.500,00
28	Komputer		1	2007	9.455.000,00	9.455.000,00
29	Komputer		1	2008	9.990.000,00	9.990.000,00
30	Laptop	Thosiba	2	2007	39.895.000,00	39.895.000,00
31	Laptop	Acer	1	2008	14.950.000,00	14.950.000,00
32	Laptop		1	2008	19.100.000,00	19.100.000,00
33	Laptop		1	2010	14.967.850,00	14.967.850,00
34	Laptop	Thosiba	1	2011	14.990.000,00	14.990.000,00
35	Printer A4		2	2011	2.980.000,00	2.980.000,00
36	Printer A4	-	1	2011	1.490.000,00	1.490.000,00
37	Printer A3	HP	1	2011	3.970.000,00	3.970.000,00
38	Printer A4	-	2	2012	1.950.000,00	1.950.000,00
39	Printer A3	Tally Geni	1	2012	7.550.000,00	7.550.000,00
40	Printer A4	Canon	1	2013	1.500.000,00	1.125.000,00
41	Printer/Plotter	Epson	1	2010	4.730.000,00	4.730.000,00
42	Kursi Kerja	-	2	2012	1.600.000,00	1.280.000,00
43	PABX	Panasonic	1	2004	48.900.000,00	48.900.000,00
	Jumlah				295,133,632.82	294,438,632.82

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17

7. Gedung dan Bangunan

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Gedung dan Bangunan	6.798.468.842,00	4.835.861.822,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp. 2.517.400.000,00
b. Harga Perolehan 2006 sd 2016	Rp.3.497.369.322,00
c. Appraisal 2011	Rp. 536.260.000,00
d. Apraisal 2012	Rp. -
e. Apraisal 2013	Rp. -
f. Apraisal 2014	Rp.
g. Appraisal 2016	Rp. 247.439.520,00

Daftar gedung dan bangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	4.835.861.822,00	2.509.725.520,00	547.118.500,-	6.798.468.842,00-
Akum Penys Gdg & Bgn	2.444.083.327,61	216.958.680,58	111.665.500,00	2.549.376.508,19
Nilai Buku	2.391.778.494,39	2.292.766.839,42	435.453.000,00	4.249.092.333,81

4.835.861.822,00

Saldo Audited 2015

Mutasi Tambah

Belanja Modal Tahun 2016	2.262.286.000,00
Hibah dari Pihak Ketiga	00
Koreksi Nilai Sesuai Appraisal	247.439.520,00
Total Mutasi Tambah	2.509.725.520,00

<u>Mutasi Kurang</u>	
Reklas ke Aset Tetap	358.791.0000,0
Lainnya	0
Reklas ke Aset Lainnya	188.327.500,00
Total Mutasi Kurang	547.118.500,00
Total Mutasi	1.962.607.020,00
Saldo per 31 Des 2016	6.798.468.842,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.262.286.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- b) Koreksi tambah nilai sebesar Rp 247.439.520,00 berdasarkan hasil penilaian aset berupa bangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Tim Penilaian Aset Tanah dan Bangunan serta Barang Inventaris Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1421-2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Hasil Penilaian Aset Berupa Tanah dan Bangunan Dinas Kehutanan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu terdiri dari :

N o	Nama Barang	Letak / Alamat	Lu as (m2)	Tahun Peroleha n	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Rmh Tinggal (Eks KRPH)	Sarilamak Labuh Panjang Ketinggian Kec. Harau Kab.50 kota	62	2000	121.926.7 20	39.016.550, 40
2	RmhTingg al (Eks KRPH)	Desa Musui, Bonjol Kab. Pasaman	62	2001	125.512.8 00	37.653.840, 00
	Jumlah				247.439.5 20	76.670.390, 40

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Reklas ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 358.791.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
- Pembangunan pagar kantor UPTD KPHL tahun 2016 sebesar Rp 222.826.000,00
 - Pembuatan sumur dan jaringan tahun 2016 sebesar Rp 19.965.000,00
 - Pembangunan Pos Jaga kantor UPTD KPHL tahun 2016 sebesar Rp 36.000.000,00
 - Pembangunan garasi UPTD KPHL tahun 2016 sebesar Rp 80.000.000,00.

Reklas aset gedung dan bangunan ke aset tetap lainnya hal ini disebabkan karena pembangunan tersebut diatas adalah untuk menunjang

gedung/bangunan kantor UPTD KPHL, sementara gedung kantor UPTD KPHL tersebut bukanlah milik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sehingga pembangunan tersebut diatas dimasukkan ke dalam kelompok Aset Tetap Lainnya/Aset Tetap Renovasi.

b) Reklas ke aset lainnya sebesar Rp 188.327.500,00 terdiri atas :

- 1) Reklas ke Aset Lainnya/Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp 179.127.500,- sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1392-2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama Barang	Letak / Alamat	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Bangunan Gedung Kantor 3	Dishut Prov. Sumbar		1986	86.777.500	52.066.500
2	Rumah Tinggal 4	Sda	165	1979	11.000.000	8.140.000
3	Rumah Tinggal 1	Sda	54	1986	42.100.000	25.260.000
4	Rumah Tinggal 14	Sda	108	1979	9.200.000	6.808.000
5	Rumah Tinggal 13	Sda	102	1979	10.300.000	7.622.000
6	Rumah Tinggal 12	Sda	66	1979	5.500.000	4.070.000
7	Lap. Bulu Tangkis	Sda	220	2009	14.250.000	1.995.000
	Jumlah				179.127.500	105.961.500

- 2) Reklas ke Aset Lainnya/Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp 9.200.000,- sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1043-2016 Tanggal 9 September 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama Barang	Letak / Alamat	Luas (m2)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan
1	Bangunan Rumah Tinggal	Jl. Simpang Tugu Pasar Rao Kenagarian Rao, Kec. Rao Mapat Tunggul Kab. Pasaman Timur/ Jl, Raya Bukittinggi Medan Nagari		1985	9.200.000	5.704.000

		Tarung-Tarung Pasaman				
	Jumlah				9.200.000	5.704.000

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17

8. Aset Tetap Lainnya

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Aset Tetap Lainnya	366.684.500,00	1.398.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 .

1) Dasar Penilaian

a. Neraca Awal 2005	Rp.	-
b. Harga Perolehan 2006 sd 2015	Rp.	1.398.000,00
c. Appraisal 2011	Rp.	-
d. Appraisal 2012	Rp.	-
e. Appraisal 2013	Rp.	-
f. Appraisal 2015	Rp.	-

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB D, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	1.398.000,00	365.286.500,00	-	366.684.500,00
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Nilai Buku	1.398.000,00	365.286.500,00	-	366.684.500,00

Saldo Audited 2015 *1.398.000,00*

Mutasi Tambah

Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan *358.791.000,00*

Reklas dari Aset Peralatan dan Mesin *6.495.500,00*

Total Mutasi Tambah **365.286.500,00**

Mutasi Kurang

Total Mutasi Kurang	-
Total Mutasi	365.286.500,00
Saldo per 31 Des 2016	366.684.500,00

Penjelasan Mutasi Tambah

- Reklasifikasi dari aset Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp358.791.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembangunan pagar kantor UPTD KPHL tahun 2016 sebesar Rp 222.826.000,00
 - Pembuatan sumur dan jaringan tahun 2016 sebesar Rp 19.965.000,00
 - Pembangunan Pos Jaga kantor UPTD KPHL tahun 2016 sebesar Rp36.000.000,00
 - Pembangunan garasi UPTD KPHL tahun 2016 sebesar Rp 80.000.000,00.

Reklas aset gedung dan bangunan ke aset tetap lainnya hal ini disebabkan karena pembangunan tersebut diatas adalah untuk menunjang gedung/bangunan kantor UPTD KPHL, sementara gedung kantor UPTD KPHL tersebut bukanlah milik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sehingga pembangunan tersebut diatas dimasukkan ke dalam kelompok Aset Tetap Lainnya/Aset Tetap Renovasi.

- Reklasifikasi dari aset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.495.500,00 yaitu berupa Plang Nama Kantor UPTD KPHL

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17 .

9. Konstruksi dalam Pengerjaan

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.000.000,00	15.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 .

- Dasar penilaian Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp15.000.000,00 tersebut berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016.
- Selama tahun 2016 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang atas aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Konstruksi Dalam Pengerjaan	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Dinas Kehutanan senilai Rp 15.000.000,00 masih merupakan site plan tahun 2009, namun karena terjadi musibah gempa tahun 2010 yang menyebabkan banyaknya bangunan dan gedung SKPD di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami rusak berat dan jika dibandingkan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat masih termasuk rusak ringan, sehingga pembangunan

kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai site plan diatas tidak menjadi prioritas pembangunan sampai sekarang, disamping itu umur KDP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah lebih dari 5 tahun, sehingga jika pembangunannya dilanjutkan maka perencanaan pembangunannya tidak mengacu lagi kepada site plan yang menjadi KDP tersebut.

Rekapitulasi mutasi tambah dan kurang Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17 dan Lampiran 20.

10. Akumulasi Penyusutan

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Akumulasi Penyusutan	7.499.151.382,61	6.335.780.674,70

Terdiri dari :

- Akum. Penyusutan Peralatan & Mesin **(4.949.774.874,42) (3.891.697.347,09)**
- Akum. Penyusutan Gdg dan Bangunan **(2.549.376.508,19) (2.444.083.327,61)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.891.697.347,09	1.352.516.160,15	294.438.632,82	4.949.774.874,42
Akum. Penyusutan Gedung dan Bgn	2.444.083.327,61	216.958.680,58	111.685.500,00	2.549.376.508,19
Jumlah Akumulasi Penyusutan	6,335,780,674.70	1,569,474,840.73	406,104,132.82	7,499,151,382.61

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2015 (AUDITED)	3.891.697.347,09	2.444.083.327,61
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:		
o Hibah dr Pihak Ketiga	189.200.000,00	

	14.708.400,0	
○ Mutasi antar SKPD	0	
○ Koreksi + saldo awal	0,01	76.670.390.41
• JUMLAH KOREKSI KURANG:		
○ Reklasifikasi	294.438.632, 82	111.665.500,0 0
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2016	1.148.607.760 ,14	140.288.290,1 8
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2016	4.949.774.874 ,42	2.549.376.508, 19

Penjelasan Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan

I. Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan

A. Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

- a) Hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp.189.200.000,00 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 189.200.000,- berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. BA.30/Menhut-II/ KUM/2014 Tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp 189.200.000,- (daftar pada penjelasan mutasi tambah aset peralatan dan mesin)
- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp 72.992.000,- dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp14.708.400,- terdiri atas :
 - 1) Mutasi antar SKPD senilai Rp 6.292.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.368.400,- yaitu dari Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat No.030/20/I/BASTBPAD-2016 Tanggal 11 Januari 2016 (daftar pada penjelasan mutasi tambah aset peralatan dan mesin)
 - 2) Mutasi antar SKPD senilai Rp 66.700.000,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 13.340.000,- yaitu dari Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah No.030/97/BAST/V/BPAD-2016 Tanggal 20 Mei 2016. (daftar pada penjelasan mutasi tambah aset peralatan dan mesin).
 - 3) Koreksi senilai Rp 0.01 yaitu dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena pembulatan dari laporan aset SIMBADA.
 - 4) Beban penyusutan aset peralatan dan mesin tahun 2016 sebesar Rp1.148.607.760,14.

B. Penjelasan Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

- a) Koreksi tambah nilai sebesar Rp 247.439.520,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp76.670.390,40 berdasarkan hasil penilaian aset berupa bangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Tim Penilaian Aset Tanah dan Bangunan serta Barang Inventaris Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1421-2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Hasil Penilaian Aset Berupa Tanah dan Bangunan Dinas Kehutanan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (daftar pada penjelasan mutasi tambah aset gedung dan bangunan).
- b) Koreksi senilai Rp 0.01 yaitu dari akumulasi penyusutan gedung dan bangunan karena pembulatan dari laporan aset SIMBADA
- c) Beban penyusutan aset gedung dan bangunan sebesar Rp 140.288.290,18.

II. Penjelasan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan

A. Penjelasan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

- Reklas ke Aset Lainnya senilai Rp 295.133.632,82 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 294.438.632,82 berdasarkan SK Gubernur Nomor. 030-1392-2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (daftar pada penjelasan mutasi kurang aset gedung dan bangunan)

B. Penjelasan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Reklas ke aset lainnya sebesar Rp 188.327.500,00 dengan total akumulasi penyusutan sebesar Rp 111.665.500,00 terdiri atas :

- Reklas ke Aset Lainnya/Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp 179.127.500,- dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 105.961.500,00 sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1392-2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (daftar pada penjelasan mutasi kurang aset gedung dan bangunan)
- Reklas ke Aset Lainnya/Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp 9.200.000,- dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 5.704.000,00 sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1043-2016 Tanggal 9 September 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (daftar pada penjelasan mutasi kurang aset gedung dan bangunan)

Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Aset Tidak Berwujud	6.000.000,00	6.000.000,00
Akum. Amortisasi Aset Tdk Berwujud	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)

Aset Lain-Lain		
- Aset Tidak Bermanfaat	-	10.848.000,00
- Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	449.788.750,00	449.788.750,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	(234.915.300,00)	(225.919.525,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	214.873.450,00	234.717.225,00

11. Aset Tidak Berwujud

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Aset Tidak Berwujud	6.000.000,00	6.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2016 dan 2015.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 6.000.000,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Berwujud	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
Akumulasi Amortisasi	(6.000.000,00)	-	-	(6.000.000,00)
Nilai Buku	-	-	-	-

Selama tahun 2016 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap aset tidak berwujud.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 18.

12. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Akum. Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud posisi 31 Desember 2016 dan 2015, tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap akumulasi amortisasi aset tidak berwujud. Sebagaimana penjelasan uraian berikut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.000.000,00)	-	-	(6.000.000,00)

Uraian	Nilai
--------	-------

SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2015 (Audited)	(6.000.000,00)
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	-
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	-
• BEBAN AMORTISASI TAHUN 2016	-
• SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 16	(6.000.000,00)

13. Aset Lain-Lain

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Aset Lain-Lain	449.788.750,00	460.636.750,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain yang sampai dengan posisi 31 Desember 2016 dan 2015 .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	10.848.000,00	-	10.848.000,00	-
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	449.788.750,00	-	-	449.788.750,00
Aset Dalam Penelusuran	-	-	-	-

Aset Lain-lain terdiri dari Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp 0 dan Aset Dipakai Pihak Lain senilai Rp 449.788.750,00.

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset Lain-lain sebagai berikut:

1) Aset Tidak Bermanfaat

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Aset Tidak Bermanfaat	-	10.848.000,00

Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp. 0,00 tersebut dicatat berdasarkan nilai buku per 31 Desember 2016 .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	210.671.591,00	991.461.132,82	1.136.632.723,82	65.500.000,00
Akumulasi Penyusutan	199.823.591,00	406.104.132,82	540.427.723,82	65.500.000,00
Nilai Buku	10.848.000,00	585.357.000,00	596.205.000,00	-

Penjelasan Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset Tidak Bermanfaat

Penjelasan Mutasi Tambah

a) Reklasifikasi senilai Rp. 991.461.132,82 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Reklas dari aset tanah senilai Rp 508.000.000,- berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman No.030/150/BAST/BPAD-2016 serta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1043-2016 Tanggal 9 September 2016 yaitu tanah bangunan kantor pemerintah yang beralamat di Jl. Raya Bukittinggi Medan Nagari Tarung-Tarung Pasaman seluas 237 m2.
- 2) Reklas dari aset peralatan dan mesin senilai Rp 295.133.632,82 berdasarkan SK Gubernur Nomor. 030-1392-2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Reklas dari aset gedung dan bangunan senilai Rp 188.327.500,00 terdiri atas
 - o Reklas senilai Rp 179.127.500,- sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1392-2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
 - o Reklas senilai Rp 9.200.000,- sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1043-2016 Tanggal 9 September 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Penghapusan karena pemusnahan bangunan senilai Rp 40.200.000,- sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat No.030-1009-2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Rumah Tinggal pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Pemuda N 12, 14 dan 16 Kelurahan Painan Utara Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, karena bangunan tersebut mengalami kebakaran.
- b) Mutasi antar SKPD sebesar Rp 517.200.000,- terdiri dari
 - Hibah asset tanah sebesar Rp 508.000.000 sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman No.030/150/BAST/BPAD-2016.
 - Hibah bangunan rumah tinggal Jl. Simpang Tugu Pasar Rao Kenagarian Rao Pasaman sebesar Rp 9.200.000,- sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1043-2016 Tanggal 9 September 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- c) Penghapusan sesuai SK Gubernur sebesar Rp 579.232.723,82 terdiri dari :
 - Berdasarkan SK Gubernur Nomor. 030-1392-2016 senilai Rp295.133.632,82 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin serta berdasarkan SK No.030-1151-2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penjualan Berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
 - Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1392-2016 Tanggal 22 Desember 2016 senilai Rp 179.127.500,- tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan serta berdasarkan SK Gubernur

Sumatera Barat No.030-1151-2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- Berdasarkan SK Gubernur No.030-668-2016 Tgl 6 Juni 2016 tentang Penghapusan BMD Berupa Peralatan dan Mesin pada Dishut Prov. Sumbar (Aset Tidak Bermanfaat) senilai Rp104.971.591,-

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran 18

Penjelasan Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Akum. Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat

Penjelasan Mutasi Tambah

Reklasifikasi senilai Rp 406.104.132,82 dengan perincian sebagai berikut :

- Reklas dari peralatan dan mesin senilai Rp 294.438.632,82 berdasarkan SK Gubernur Nomor.030-1392-2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta berdasarkan SK No.030-1151-2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penjualan Berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (daftar pada penjelasan mutasi kurang aset peralatan dan mesin)
- Reklas dari aset gedung dan bangunan senilai Rp 111.665.500 yaitu berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1043-2016 Tanggal 9 September 2016 senilai Rp 5.704.000,- tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, serta berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1392-2016 Tanggal 22 Desember 2016 senilai Rp 105.961.500,- tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan serta berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat No.030-1151-2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penjualan BMD berupa Sisa Bongkaran Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Penghapusan karena pemusnahan bangunan senilai Rp 29.352.000,- sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat No.030-1009-2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Rumah Tinggal pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat karena bangunan tersebut terbakar.
- b) Mutasi antar SKPD senilai Rp 5.704.000,- berdasarkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-1043-2016 Tanggal 9 September 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- c) Penghapusan senilai Rp 400.400.132,82 yaitu :
Berdasarkan SK Gubernur Nomor.030-1392-2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat serta berdasarkan SK No.030-1151-2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penjualan sisa bongkaran gedung dan bangunan

2) Aset Dimanfaatkan Pihak Lain

Perkiraan	2016	2015 (audited)
-----------	------	----------------

Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	449.788.750,00	460.636.750,00
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Dan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain senilai Rp. 449.788.750,00,00 dicatat berdasarkan nilai neraca awal 2005 Rp 307.740.000,- dan nilai appraisal 2011 Rp.228.048.750,00, serta dengan mutasi sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	449.788.750,00	-	-	449.788.750,00
Akumulasi Penyusutan	225.919.525,00	8.995.775,00	-	234.915.300,00
Nilai Buku	223.869.225,00	(8.995.775,00)		214.873.450,00

Selama tahun 2016 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan terhadap aset dimanfaatkan pihak lain.

Penjelasan Mutasi Tambah & Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain:

Penjelasan Mutasi Tambah

- Beban penyusutan tahun 2016 sebesar Rp 8.995.775,00

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Dimanfaatkan Pihak Lain dapat dilihat pada Lampiran 18

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Kewajiban Jangka Pendek	417.676.623,00	423.134.970,00

14. Utang Belanja

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Utang Belanja	417.676.623,00	423.134.970,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa dan PNS per 31 Desember 2016 dan 2015. Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- **Utang belanja pegawai** **404.960.987,-**

Yaitu utang belanja tambahan penghasilan kepada PNS atas kinerjanya yang telah dilaporkan untuk bulan November sebesar Rp 201.797.418,00 dan bulan Desember sebesar Rp 203.163.569,00. Pengakuan utang ini sesuai dengan Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2015 tgl Februari 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana pasal 9 yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada 2 bulan sebelumnya.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	412.184.995,00	404.960.987,00	412.184.995,00	404.960.987,00

Penambahan sebesar Rp 404.960.987,00 adalah utang belanja pegawai yaitu belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan November 2016 senilai Rp201.797.418,00 dan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bulan Desember 2016 sebesar Rp 203.163.569,00.

Pengurangan utang belanja pegawai senilai Rp 412.184.995,00 adalah pelunasan utang belanja pegawai / belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tahun 2015

- **Utang belanja barang dan Jasa 12.715.636,00.**

Yaitu utang belanja telp, air, listrik dan fax yang merupakan pemakaian bulan Desember 2016 yang dibayarkan bulan Januari 2017.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Brg dan Jasa	10.949.975,00	12.715.636,00	10.949.975,00	12.715.636,00

Penambahan sebesar Rp 12.715.636,00 adalah utang belanja telp, air, listrik dan fax tahun 2016 terdiri dari belanja telp Rp 395.094,- belanja air Rp 1.173.000,- belanja listrik Rp 10.751.312,- dan belanja fax Rp 396.230,-.

Pengurangan sebesar Rp 10.949.975,00 adalah pelunasan utang belanja telp, air, listrik dan fax tahun 2015.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat dilihat pada Lampiran 13.

EKUITAS**15. Ekuitas**

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
Ekuitas	38.023.443.444,90	38.998.545.200,27

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015. Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas 38.023.443.444,90
- Surplus/Defisit LO (19.886.368.281,33)
- Perubahan SAL 24.101.854.218,00
- Surplus/Defisit LRA (24.101.854.218,00)
- RK/PPKD 24.101.854.218,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN-LO

Perkiraan	2016	2015
Pendapatan-LO	48.490.008,00	46.492.704,00

1. Pendapatan Retribusi Daerah -LO

Jumlah tersebut merupakan Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO dalam Tahun 2016 dan Tahun 2015. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.997.304,-

Pendapatan ini terdiri dari:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO

Perkiraan	2016	2015
Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	48.490.008,00	46.492.704,00

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan-LRA dengan Pendapatan-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Pendapatan LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
• Pendapatan Retribusi Daerah	48.490.008,00	48.490.008,00	-

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2016	2015
Beban Pegawai	10.572.981.282,00	10.871.692.985,00
Beban Barang dan Jasa	8.063.985.182,00	6.812.770.177,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.297.891.825,33	751.529.391,97
Beban Operasi-LO	19.934.858.289,33	18.435.992.553,97

a. Beban Pegawai

Perkiraan	2016	2015
Beban Pegawai	10.572.981.282,00	10.871.692.985,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO, yaitu :

Perkiraan	2016	2015
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	8.149.217.355,00	7.727.978.045,00
Gaji Pokok PNS/uang Representasi - LO	6.521.233.100,00	5.998.397.400,00
Tunjangan Keluarga - LO	590.149.424,00	586.970.962,00
Tunjangan Jabatan - LO	301.090.000,00	304.330.000,00
Tunjangan Fungsional - LO	155.220.000,00	155.220.000,00
Tunjangan Fungsional Umum - LO	206.230.000,00	209.960.000,00
Tunjangan Beras - LO	335.304.600,00	355.735.560,00
Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus - LO	39.901.164,00	117.244.128,00
Pembulatan Gaji - LO	89.067,00	119.995,00
Tambahan Pengh. Berdasarkan Beban Kerja - LO	2.423.763.927,00	2.881.514.940,00
Tambahan Penghs Berdasarkan Pertimbg Objektif - LO	-	262.200.000,00
JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO	10.572.981.282,00	10.871.692.985,00

Saldo / jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto, serta tidak ada pengembalian beban pegawai selama tahun 2016.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

<i>Objek Belanja LRA/LO</i>	<i>Belanja Pegawai LRA</i>	<i>Beban Pegawai LO</i>	<i>Selisih +/-</i>
• <i>Gaji dan tunjangan</i>	<i>8.149.217.355,00</i>	<i>8.149.217.355,00</i>	<i>-</i>
• <i>Tambahan Penghasilan PNS</i>	<i>2.430.987.935,00</i>	<i>2.423.763.927,00</i>	<i>7.224.008,00</i>
<i>Jumlah</i>	<i>10.580.205.290,00</i>	<i>10.572.981.282,00</i>	<i>7.224.008,00</i>

Penjelasan selisih:

- a *Penyesuaian untuk mengakui beban Tambahan Penghasilan PNS-LO bulan Nov sebesar Rp.201.797.418,00 dan bulan Desember 2016*

sebesar Rp 203.163.569,00 berdasarkan hasil verifikasi Laporan Harian PNS yang telah bekerja bulan Nov dan Desember 2016 dan akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi pada Jan dan Februari 2017 sehingga dicatat sebagai utang belanja pegawai per 31 Des 2016.

b. Beban Barang & Jasa

Perkiraan	2016	2015
Beban Barang dan Jasa	8.063.985.182,00	6.812.770.177,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

URAIAN	2016	2015
Beban Barang dan Jasa	8.063.985.182,00	6.812.770.177,00
Beban Bahan Pakai Habis	469,195,435,00	532,103,827,00
Beban Persediaan alat tulis kantor	120.589.920,00	108,668,765,00
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.499.225,00	9,710,575,00
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	8.181.000,00	9,645,000,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	129.879.550,00	183,095,687,00
Beban Seminar Kit Peserta	14,375,000,00	4,250,000,00
Beban peralatan/perengkapan pakai habis	185,670,750,00	216,733,800,00
Beban Persediaan Bahan/ Material	962.703.250,00	1,205,867,850,00
Beban Persediaan bahan baku bangunan	215.468.000,00	324,015,550,00
Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	663.336.350,00	726,503,900,00
Beban Persediaan bahan obat-obatan	1.400.000,00	666,400,00
Beban Persediaan bahan kimia	79.543.900,00	147,757,000,00
Beban Bahan Percontohan/Promosi	2.955.000,00	6,925,000,00
Beban Jasa Kantor	367.864.215,00	332,974,165,00
Beban Jasa telepon	7.747.594,00	7,337,159,00
Beban Jasa air	15.525.050,00	11,177,300,00
Beban Jasa listrik	115.618.977,00	115,102,290,00
Beban Jasa surat kabar/majalah	10.958.000,00	9,496,500,00
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	61.672.271,00	50,237,993,00
Beban Jasa paket/pengiriman	120.000,00	120,000,00
Beban Jasa Sertifikasi		4,700,000,00
Beban Jasa Publikasi	400.000,00	7,500,000,00

Beban jasa akomodasi	29.793.000,00	35,462,000.00
Beban pajak bumi dan bangunan	989.323,00	989,323.00
Beban Transportasi	125.040.000,00	90,851,600.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	140.576.206,00	143,128,295.00
Beban Jasa Service	26.462.289,00	20,269,038.00
Beban Penggantian Suku Cadang	65.333.427,00	68,175,385.00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	33.774.900,00	39,225,318.00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	15.005.590,00	15,458,554.00
Beban Cetak dan Penggandaan	199.717.200,00	211,940,500.00
Beban Cetak	93.938.500,00	115,909,750.00
Beban Penggandaan	105.778.700,00	96,030,750.00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.500.000,00	50,000,000.00
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	25.000.000,00	49,000,000.00
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	1,000,000.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	12,650,000.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat		12,650,000.00
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	750.000,00	
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	27,000,000.00
Beban sewa taman/bunga untuk taman hias	5.000.000,00	10,000,000.00
Beban sewa bandwidth	5,000,000.00	17,000,000.00
Beban Makanan dan Minuman	168.476.000,00	208,923,500.00
Beban makanan dan minuman harian pegawai	14.592.000	25,896,000.00
Beban makanan dan minuman rapat	30.770.000,00	53,857,500.00
Beban makanan dan minuman kegiatan	123.114.000	129,170,000.00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	82.852.000,00	74,643,000.00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	82.852.000,00	74,643,000.00
Belanja Pakaian Kerja	17.650.000,00	68,540,000.00
Beban pakaian kerja lapangan	17.650.000,00	68,540,000.00
Beban Perjalanan Dinas	2.642.706.751,00	2,515,150,800.00
Beban perjalanan dinas dalam daerah	2.293.623.970,00	2,120,456,600.00
Beban perjalanan dinas luar daerah	349.082.781,00	394,694,200.00
Beban Pemeliharaan	331.910.600,00	107,670,000.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.181.000,00	31,720,000.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	259.729.600,00	75,950,000.00
Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.500.000,00	13,750,000.00
Beban sosialisasi		13,750,000.00
Beban kursus-kursus singkat/pelatihan	4.500.000,00	
Honorarium PNS	231.880.000,00	320,750,000.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.850.000,00	125,300,000.00

- LO		
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah – LO	150.030.000,00	166,350,000.00
Honorarium Pengelola SIPKD – LO	18.000.000,00	18,000,000.00
Honorarium Pengelola Aset Daerah-LO	25.200.000,00	
Honorarium Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja SKPD – LO	4.800.000,00	5,100,000.00
Honorarium Pengelola SIMGAJI PNSD – LO	6.000.000,00	6,000,000.00
Beban Honorarium Non PNS	911.672.725,00	798.379.240,00
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur - LO		4,800,000.00
Beban Jasa Moderator	9.000.000,00	7,500,000.00
Beban Jasa Pengawas	14.400.000,00	55,200,000.00
Beban Jasa Buruh/Tukang/Mandor	706.220.000,00	588,949,240.00
Beban Jasa Pembuatan Peta (Manual/Tematik/Digital)	13.280.000,00	22,560,000.00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	750.000,00	1,100,000.00
Beban Jasa Pembaca Doa/Alqur'an	3.600.000,00	4,350,000.00
Beban Jasa Sopir	25.152.725,00	21,000,000.00
Beban Jasa Peliputan		1,850,000.00
Beban Jasa Penceramah/Rohaniwan	5.000.000,00	5,750,000.00
Beban Jasa Petugas Lapangan	10.800.000,00	
Beban Jasa Pengelola SIMBANGDA-LO	2.000.000,00	
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	42.650.000,00	6,500,000.00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap – LO	66.820.000,00	66,820,000.00
Honorarium Pengelola SIPKD – LO	12.000.000,00	12,000,000.00
Beban Jasa Lembaga	232.496.800,00	94,499,000.00
Beban jasa lembaga sertifikasi	16.500.000,00	16,500,000.00
Beban jasa lembaga pengamanan	215.996.800,00	77,999,000.00
Beban Jasa Lainnya	1.254.534.000,00	94,800,000.00
Beban Jasa Cleaning Service	210.445.000,00	94,800,000.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.297.891.825,33	751,529,391.97
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.148.607.760,15	640,213,467.20
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	140.288.290,18	101,516,149.77
Beban Penyusutan Aset Lainnya	8.995.775,00	9,799,775.00
Beban Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	8.995.775,00	9,799,775.00
JUMLAH BEBAN	19.934.858.289,33	18,435,992,553.97

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto, serta tidak ada pengembalian beban barang dan jasa selama tahun 2016.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg&Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
• Belanja Bahan Pakai Habis	460.923.650,00	469.195.435,00	(8.271.785,00)
• Bli Bahan/Material	962.703.250,00	962.703.250,00	-
• Belanja Jasa Kantor	366.477.604,00	367.864.215,00	(1.386.611,00)
• Belanja Perawatan Kendaraan Bermtr	142.699.381,00	140.576.206,00	2.123.175,00
• Belanja Cetak dan Penggandaan	198.024.700,00	199.717.200,00	(1.692.500,00)
• Belanja Sewa Rumah/Gedung/	27.500.000,00	27.500.000,00	-
• Belanja Sewa Sarana Mobilitas	750.000,00	750.000,00	-
• Belanja Sewa Perlkp & Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-
• Belanja Makanan dan Minuman	168.476.000,00	168.476.000,00	-
• Belanja Pakaian Dinas & Atributnya	82.852.000,00	82.852.000,00	-
• Bli Pakaian Kerja	17.650.000,00	17.650.000,00	-
• Bli Perjalanan Dinas	2.642.706.751,00	2.642.706.751,00	-
• Bli Pemeliharaan	331.910.600,00	331.910.600,00	-
• Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi	4.500.000,00	4.500.000,00	-
• Belanja Jasa Lembaga	232.496.800,00	232.496.800,00	-
• Honorarium PNS	231.880.000,00	231.880.000,00	-
• Honorarium Non	911.672.725,00	911.672.725,00	-

PNS			
• Belanja Kontribusi	7.000.000,00	7.000.000,00	-
• Belanja Jasa Lainnya	1.254.534.000,00	1.254.534.000,00	-
Jumlah	8.054.757.461,00	8.063.985.182,00	(9.227.721,00)

Penjelasan selisih:

- a . Penyesuaian menambah beban barang dan Jasa
- Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Bahan Pakai Habis	30.779.740,00	3.623.225,00	773.500,00	36.201.800,00		8.271.785,00
• Bli Bahan/ Material	-					
• Belanja Jasa Kantor		11.329.025,00	12.715.636,00			1.386.611,00
• Bli Perawatan Kend Bermtr			2.123.175,00		2.123.175,00	
• Bli Cetak & Penggandaan	10.029.500,00			11.722.000,00		1.692.500,00
Jumlah	40.809.240,00	14.952.250,00	13.489.136,00	50.046.975,00	2.123.175,00	11.350.896,00

- Penyesuaian mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2016 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air, internet bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2016

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Telepon	852.104,00			395.094,00	457.010,00	
• Belanja Listrik	10.228.712,00			10.751.312,00		522.600,00

• Belanja Air				1.173.000, 00		1.173.000 ,00
• Belanja Jasa Kawat/Faksimili / Internet	248.209,0 0			396.230,0 0		148.021,0 0
Jumlah					457.010, 00	1.843.621 ,00

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Perkiraan	2016	2015
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.297.891.825,33	751.529.391,97

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2016 dan Tahun 2015. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1.148.607.760,15
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 140.288.290,18
- Beban Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain 8.995.775,00

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran .

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2016	2015
Ekuitas Akhir	42.238.929.381,57	38.384.156.265,30

1	Ekuitas Awal		38.384.156.265,30
2	Surplus/Defisit LO		(19.886.368.281,33)
3	RK PPKD		24.101.854.218,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar		(360.712.820,40)
	• Koreksi Utang Tahun Lalu	(379.050,00)	
	• Mutasi Tambah Aset Tetap/Aset Lainnya	263.827.727,00	
	• Mutasi Kurang Aset Tetap/Aset Lainnya	(624,540.550,00)	
5	Ekuitas Akhir		42.238.929.381,57

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Ekuitas Awal sebesar Rp 38.384.156.265,30 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca (audited) per 31 Des 2015.
- Surplus/Defisit LO sebesar (Rp. 19.886.368.281,33) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2016
- RK PPKD sebesar Rp 24.101.854.218,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
- Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Koreksi Utang Tahun Lalu senilai Rp 379.050,-, yaitu selisih pelunasan utang belanja telp, listrik dan fax tahun 2015.**

- Mutasi tambah Aset Tetap/Aset Lainnya senilai Rp 263.827.729,60 terdiri atas :**

a.	Mutasi Peralatan dan Mesin sesuai BAST No.030/20/I/ BASTBPAD-2016 Tanggal 11 Januari 2016	4,923,600.00
b.	Mutasi aset Plang Nama Tanah sesuai BAST No. 030/97/BAST/V/BPAD-2016 Tanggal 20 Mei 2016	53,360,000.00
c.	Hasil penilaian aset berupa tanah dan bangunan sesuai SK Gubernur Prov. Sumbar No.030-1421-2016 Tgl 29-12-2016	191,169,129.60
d.	Mutasi Aset sesuai BAST No.030/225/BAST/XII/BPAD-2016 Tanggal 21 Desember 2016	14,375,000.00
	Jumlah	263,827,729.60

- Mutasi Kurang Aset Tetap/Aset Lainnya senilai Rp 624.161.500,-, terdiri atas :**

a.	Belanja Modal Tidak dikapitalisir	27,956,500.00
b.	Penghapusan aset tanah dan bangunan sesuai SK No 030/1043/2016	511,496,000.00
c.	Penghapusan aset tidak bermanfaat sesuai SK No.030/1009/2016	10,848,000.00
d.	Penghapusan aset tidak bermanfaat sesuai SK No.030/1392/2016	73,861,000.00
	Jumlah	624,161,500.00

- Ekuitas Akhir sebesar Rp 42.238.929.381,57 adalah saldo Ekuitas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah	48.490.008,00	48.490.008,00	-
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi	48.490.008,00	48.490.008,00	-
• Lain-lain PAD Yg Sah			
Jumlah Pendapatan			
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	10.580.205.29 0,00	10.572.981.28 2,00	7.224.008,00
• Belanja Brg & Jasa	8.054.757.461, 00	8.063.985.182, 00	(9.227.721,00)
• Belanja Modal	5.515.381.475, 00		5.515.381.475, 00

• <i>Beban Penyusutan & Amortisasi</i>		1.297.891.825, 33	(1.297.891.825, ,33)
• <i>Beban Penyisihan Piutang</i>			
Jumlah <i>Beban Operasi</i>	24.150.344.22 6,00	19.934.858.28 9,33	4.215.485.936, 67

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Struktur Organisasi

Secara kelembagaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di Bidang Kehutanan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Bidang (UPTD) yaitu:

- a. Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program
- b. Bidang Pemanfaatan Hutan
 - Seksi Perizinan Usaha Kehutanan
 - Seksi Produksi Hasil Hutan
 - Seksi Penatausahaan Hasil Hutan

- c. Bidang Planologi Kehutanan
 - Seksi Penggunaan Kawasan Hutan
 - Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan
 - Seksi Rencana Kawasan Hutan
- d. Bidang Pengamanan Dan Perlindungan Hutan
 - Seksi Penyidikan dan Pengamanan Hutan
 - Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - Seksi Konservasi dan Jasa Lingkungan
- e. Bidang Rehabilitasi Hutan Dan Lahan
 - Seksi Reklamasi dan Rhabilitasi Hutan dan Lahan
 - Seksi Perhutanan Sosial
 - Seksi Aneka Guna Hutan
- f. UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan
 - Subbagian Tata Usaha
 - Seksi Pengembangan Sumber Benih
 - Seksi Informasi dan Peredaran Benih
- g. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Barisan
 - Subbagian Tata Usaha
 - Seksi Konversi Kawasan
 - Seksi Usaha Kawasan

Dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, baik yang bersifat langsung maupun pembangunan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangannya dapat dibagi menjadi 3 bagian pokok yaitu Pelayanan, Pengawasan dan Regulasi sebagaimana tercantum dalam kewenangan di bidang Kehutanan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6.2 Komposisi Pegawai

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai

Secara keseluruhan personil yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah 134 orang yang terdiri dari :

 - 131 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil
 - 3 orang berstatus Pegawai Tidak Tetap
- b. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :
 - S2 : 20 orang
 - S1 : 38 orang
 - D3 : 11 orang

- SLTA : 56 orang
 - SLTP : 3 orang
 - SD : 2 orang
- c. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- Golongan IV : 17 orang
 - Golongan III : 87 orang
 - Golongan II : 21 orang
 - Golongan I : 5 orang
- d. Jumlah Pejabat struktural dan fungsional di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :
- Pejabat Struktural
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 7 orang
 - Eselon IV : 21 orang
 - Pejabat Fungsional : 15 Orang

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 Berbasis AkruaI telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna dalam arti belum seperti yang diharapkan. Dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 Berbasis AkruaI telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah. Meskipun demikian dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 Berbasis AkruaI juga memperhatikan Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014.

Sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan

Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(SAP)
Tahun 2016 dan 2015

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015 (Audited)
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah	40,261,000.00	48,490,008.00	120.44%	46,492,704.00
Lain-Lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	40,261,000.00	48,490,008.00	120.44%	46,492,704.00
JUMLAH PENDAPATAN	40,261,000.00	48,490,008.00	120.44%	46,492,704.00
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	10,971,740,718.00	10,580,205,290.00	96.43%	10,459,507,990.00
Belanja Barang dan Jasa	9,709,121,100.00	8,054,757,461.00	82.96%	6,808,085,629.00
Jumlah Belanja Operasional	20,680,861,818.00	18,634,962,751.00	90.11%	17,267,593,619.00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	3,422,453,825.00	3,253,095,475.00	95.05%	554,010,000.00
Belanja Gedung dan Bangunan	2,438,265,500.00	2,262,286,000.00	92.78%	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap lainnya				
Jumlah Belanja Modal	5,860,719,325.00	5,515,381,475.00	94.11%	554,010,000.00
JUMLAH BELANJA	26,541,581,143.00	24,150,344,226.00	90.99%	17,821,603,619.00
SURPLUS/DEFISIT	(26,501,320,143.00)	(24,101,854,218.00)	90.95%	(17,775,110,915.00)

Padang, 31 Desember 2016
KEPALA DINAS

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Versi Permendagri 13)
Tahun 2016

Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Sisa Anggaran
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	40,261,000.00	48,490,008.00	120.44%	8,229,008.00
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah	40,261,000.00	48,490,008.00	120.44%	8,229,008.00
Lain-Lain PAD yang Sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	40,261,000.00	48,490,008.00	120.44%	8,229,008.00
JUMLAH PENDAPATAN	40,261,000.00	48,490,008.00	120.44%	8,229,008.00
BELANJA				
Belanja Tidak Langsung	10,971,740,718.00	10,580,205,290.00	96.43%	391,535,428.00
Belanja Pegawai	10,971,740,718.00	10,580,205,290.00	96.43%	391,535,428.00
Belanja Langsung	15,569,840,425.00	13,570,138,936.00	87.16%	1,999,701,489.00
Belanja Pegawai	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	9,709,121,100.00	8,054,757,461.00	82.96%	1,654,363,639.00
Belanja Modal	5,860,719,325.00	5,515,381,475.00	94.11%	345,337,850.00
JUMLAH BELANJA	26,541,581,143.00	24,150,344,226.00	90.99%	2,391,236,917.00
SURPLUS/(DEFISIT)	(26,501,320,143.00)	(24,101,854,218.00)	90.95%	(2,383,007,909.00)

Padang, Desember 2016
KEPALA DINAS

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Uraian	2016	2015 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
-Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
-Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
-Kas di BLUD		
-Setara Kas		
Piutang Pendapatan	-	-
-Piutang pajak daerah		
-Piutang Retribusi	-	-
Penyisihan Piutang		
- Penyisihan Piutang Pendapatan		
Beban Dibayar Dimuka	2,123,175.00	
Persediaan	23,207,650.00	33,171,935.00
Jumlah Aset Lancar	25,330,825.00	33,171,935.00
ASET TETAP		
Tanah	33,944,327,600.00	34,431,927,600.00
Peralatan dan Mesin	8,791,072,170.18	5,590,995,328.00
Gedung dan Bangunan	6,798,468,842.00	4,835,861,822.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	366,684,500.00	1,398,000.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	15,000,000.00	15,000,000.00
Akumulasi Penyusutan	(7,499,151,382.61)	(6,335,780,674.70)
Jumlah Aset Tetap	42,416,401,729.57	38,539,402,075.30
ASET LAINNYA	214,873,450.00	234,717,225.00
Aset Tidak Berwujud	6,000,000.00	6,000,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6,000,000.00)	(6,000,000.00)
Aset Lain-Lain	449,788,750.00	460,636,750.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(234,915,300.00)	(225,919,525.00)
Jumlah Aset Lainnya	214,873,450.00	234,717,225.00
JUMLAH ASET	42,656,606,004.57	38,807,291,235.30
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Belanja Pegawai	404,960,987.00	412,184,995.00
Utang Belanja Barang dan Jasa	12,715,636.00	10,949,975.00
Utang belanja modal	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	417,676,623.00	423,134,970.00
JUMLAH KEWAJIBAN	417,676,623.00	423,134,970.00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas		
-Ekuitas	38,023,443,444.90	38,998,545,200.27
-Surplus / Defisit LO	(19,886,368,281.33)	(18,389,499,849.97)
Ekuitas SAL		
Perubahan SAL	24,101,854,218.00	17,775,110,915.00
Surlus/Defisit-LRA	(24,101,854,218.00)	(17,775,110,915.00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		
RK PPKD	24,101,854,218.00	17,775,110,915.00
JUMLAH EKUITAS	42,238,929,381.57	38,384,156,265.30
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	42,656,606,004.57	38,807,291,235.30

Padang, 31 Desember 2016
KEPALA DINAS,

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003